

### BAB III

## GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Analisa pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan kuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisa pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui DPRD melalui Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai program pembangunan strategis pada satuan program kegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Hubungan antara dokumen perencanaan strategis dengan anggaran, dapat dilihat pada gambar 3.1. berikut ini :

Gambar 3.1.

Kerangka Hubungan Antara Kebijakan Keuangan Daerah/APBD



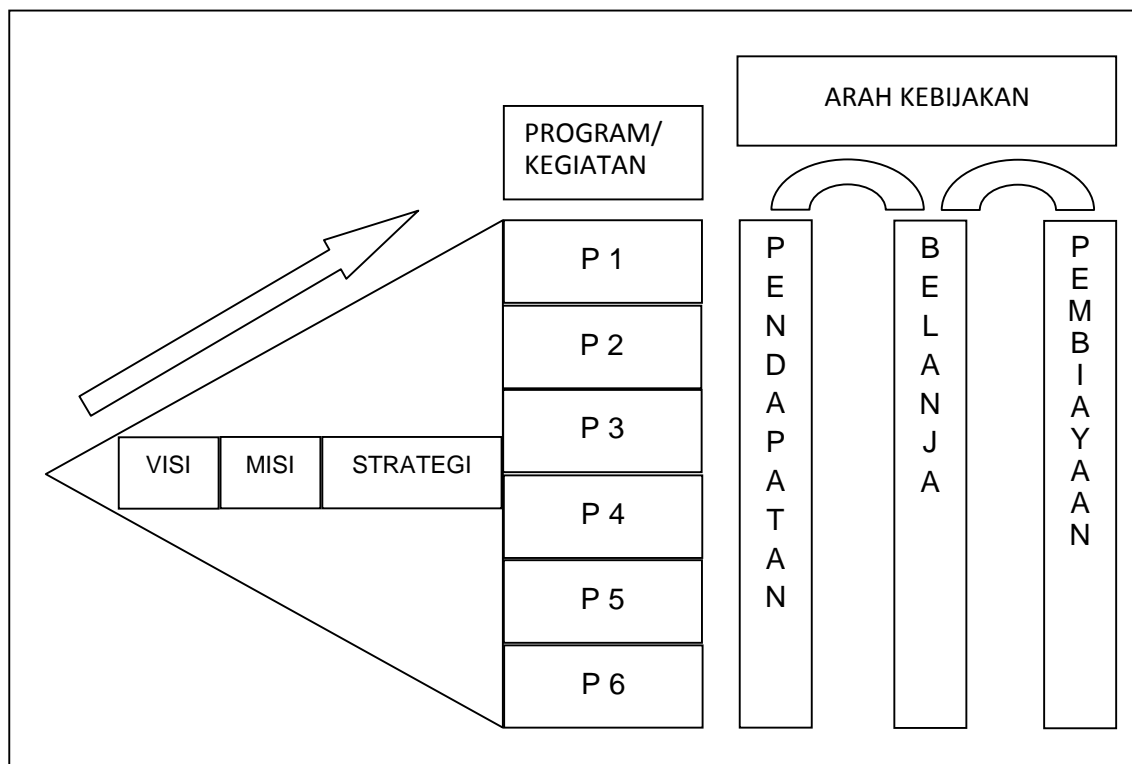
Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Kabupaten Ciamis mengandung makna :

1. Arah belanja daerah digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan.
2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang sustain dan jumlah yang memadai.

Kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda maka kebijakan keuangan daerah dirinci pada masing-masing komponen tersebut meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun hubungan strategi dengan arah kebijakan komponen APBD dapat dilihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2

Hubungan Antara Proses Perencanaan dengan Keuangan



Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara proses perencanaan kegiatan dengan keuangan. Satuan terkecil dari perencanaan strategis adalah program dan kegiatan. Melalui analisis standar belanja, standar pelayanan dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kabupaten Ciamis pada prinsipnya diarahkan agar dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran berkenaan harus dimasukkan dalam APBD dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja.

### 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan dimasa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif. Transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek non fisik maupun fisik.

Sebagai dasar perhitungan struktur APBD adalah asumsi indikator makro ekonomi yaitu : (1) adanya rencana kenaikan tariff dasar listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM), (2) belum pulihnya perekonomian nasional yang berimbas kepada perekonomian daerah, (3) terjadinya laju inflasi sebagai akibat terjadinya krisis di Negara Eropa dan Amerika yang mengakibatkan naiknya harga-harga impor.

### 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Menganalisis kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

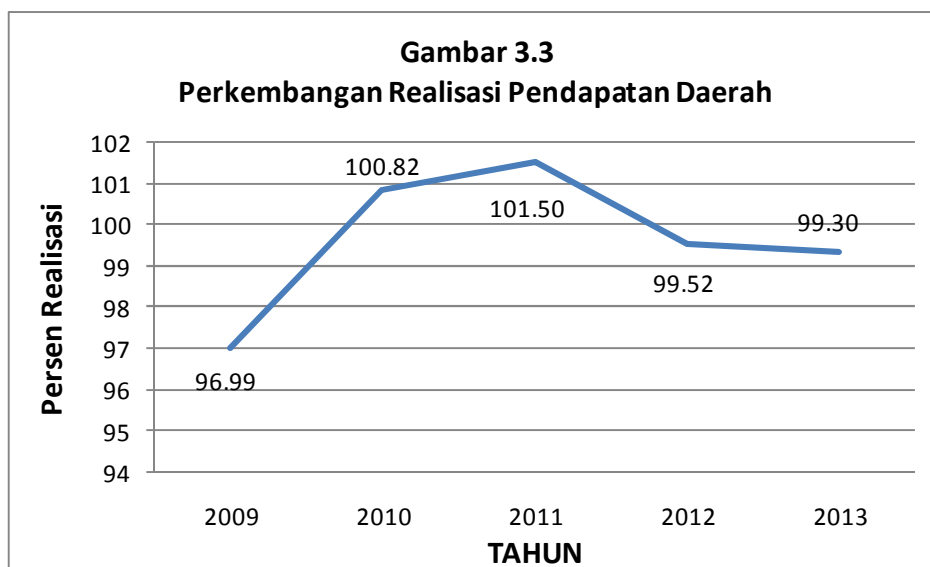
#### 3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini sebagaimana terlihat dari target dan realisasi pendapatan daerah pada tabel 3.1.

Pada tahun 2009, target Pendapatan daerah sebesar Rp. 1,389 Trilyun lebih dapat direalisasikan sebesar Rp. 1,347 Trilyun lebih atau sebesar 96,99 %, sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan target sebesar Rp. 2,212 Trilyun lebih dengan realisasi sebesar Rp. 2,196 Trilyun lebih atau 99,30 %. Adapun perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi sebagaimana terlihat pada gambar 3.3.

**Tabel 3.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2009-2013**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Setelah Perubahan APBD (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>%</b>	<b>Bertambah / Berkurang</b>
2009	1,389,466,241,068.00	1,347,606,475,292.00	96.99	(41,859,765,776.00)
2010	1,307,941,678,501.00	1,318,623,298,748.00	100.82	10,681,620,247.00
2011	1,576,226,705,135.00	1,599,795,624,968.00	101.50	23,568,919,833.00
2012	1,876,326,521,303.00	1,867,335,578,125.00	99.52	(8,990,943,178.00)
2013	2,212,061,140,549.00	2,196,493,936,848.00	99.30	(15,567,203,701.00)
<b>Jumlah</b>	<b>8,362,022,286,556.00</b>	<b>8,329,854,913,981.00</b>	<b>99.62</b>	<b>(32,167,372,575.00)</b>



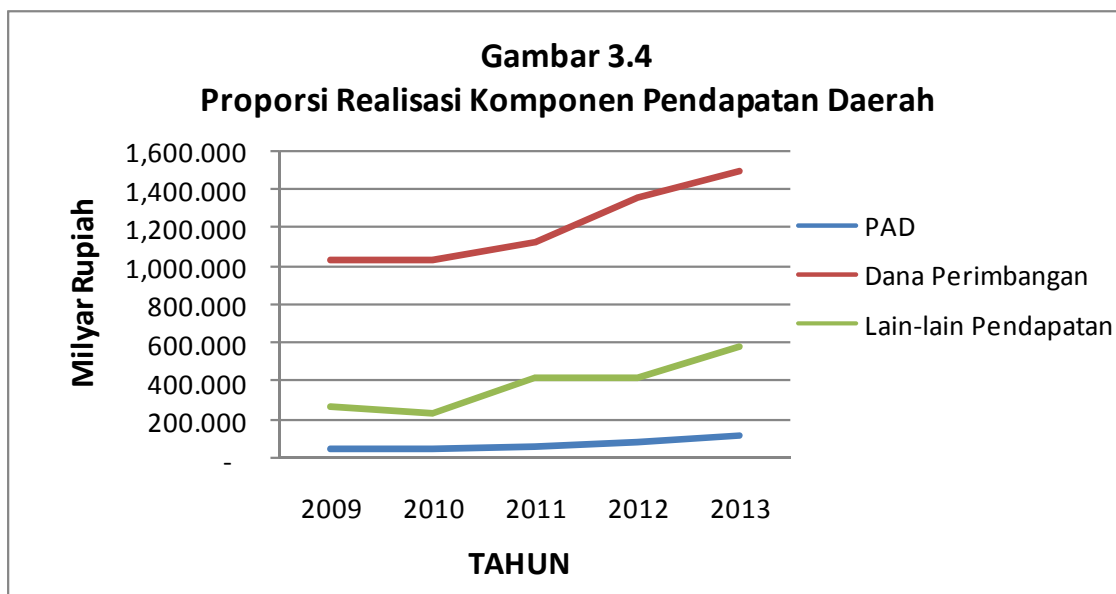
Total target Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis selama periode tahun 2009-2013 sebesar Rp. 8,362 Trilyun lebih dengan realisasi sebesar Rp. 8,329 Trilyun lebih atau sebesar 99,62 %.

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah selama tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 3.2 dan Gambar 3.4. berikut.

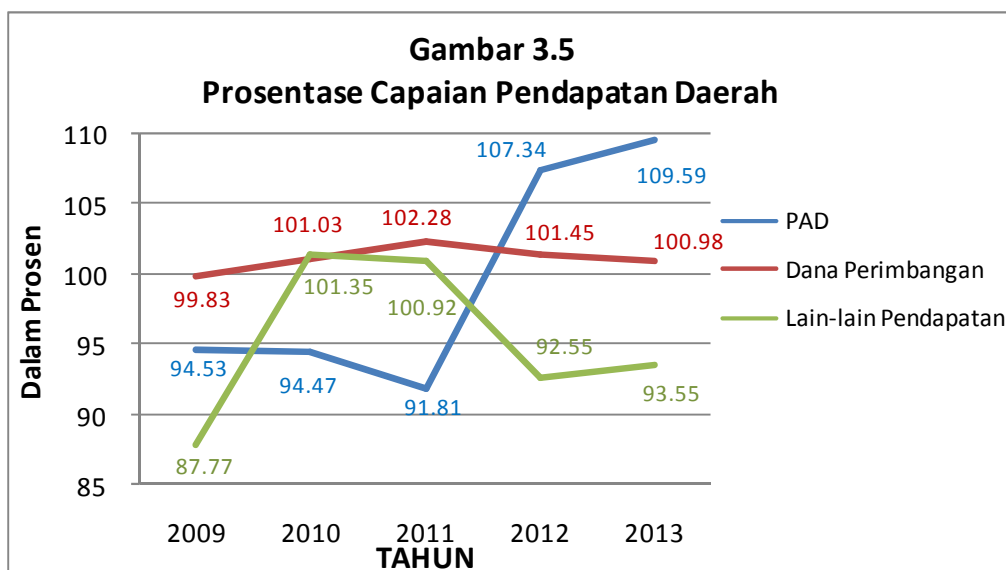
**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013**

(Milyar Rupiah)

Tahun	PAD			Dana Perimbangan			Lain-lain Pendapatan		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2009	54,247	51,277	94,53	1.031,886	1.030,100	99,83	303,334	266,230	87,77
2010	53,469	50,513	94,47	1.025,164	1.035,710	101,03	229,310	232,400	101,35
2011	64,154	58,901	91,81	1.098,603	1.123,614	102,28	413,470	417,281	100,92
2012	81,717	87,712	107,34	1.334,040	1.353,386	101,45	460,569	426,238	92,55
2013	107,195	117,476	109,59	1.479,501	1.494,017	100,98	625,365	585,001	93,55



Dari data diatas terlihat bahwa selama kurun waktu 2009-2013, realisasi PAD meningkat dari Rp. 51.276.555.046,00 pada tahun 2009, menjadi Rp. 117.475.935.245,00 Pada tahun 2013. Pada kurun waktu yang sama, dana perimbangan meningkat dari Rp. 1.030.099.884.133,00 pada tahun 2009, menjadi Rp. 1.494.016.559.741,00 pada tahun 2013. Begitu pula dengan pendapatan lain-lain yang sah, meningkat dari Rp. 266.230.036.113,00 menjadi Rp. 585.001.441.862,00 pada tahun 2013. Namun demikian, secara prosentasi, selama kurun waktu 2009-2013, realisasinya berfluktuasi seperti terlihat pada Gambar 3.5 berikut :

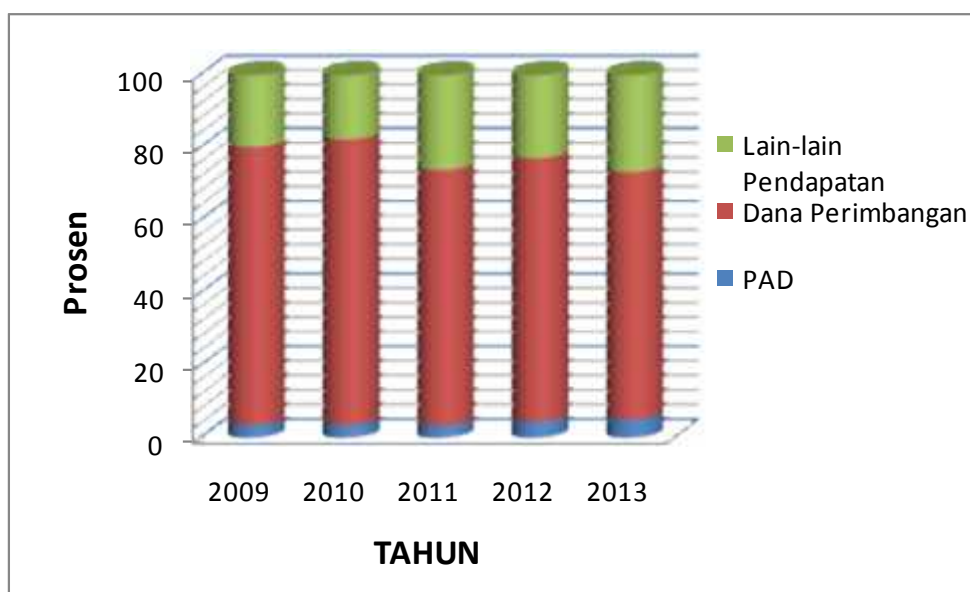


Salah satu ukuran kemandirian Pemerintah Daerah adalah dengan melihat proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Selama tahun 2009-2013, proporsi PAD cenderung meningkat yaitu pada tahun 2009 sebesar 3,81 % meningkat menjadi 5,35 % pada tahun 2013, dan pada tahun 2013 mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 5,35 % Sangat rendahnya proporsi PAD (masih dibawah 10 %) menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Pemerintah Pusat dan atau proporsi dari sisi finansial masih sangat tinggi. Perkembangan proporsi dapat dilihat pada tabel 3.3 dan Gambar 3.6.

**Tabel 3.3**  
**Perkembangan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2009-2013**

Tahun	PAD		Dana Perimbangan		Lain-lain Pendapatan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2009	51.276.555.046,00	3,81	1.030.099.884.133,00	76,44	266.230.036.113,00	19,76
2010	50.512.875.943,00	3,83	1.035.710.000.785,00	78,54	232.400.422.020,00	17,62
2011	58.900.535.511,00	3,68	1.123.613.689.708,00	70,23	417.281.399.749,00	26,08
2012	87.711.885.423,00	4,70	1.353.385.828.508,00	72,48	426.237.864.194,00	22,83
2013	117.475.935.245,00	5,35	1.494.016.559.741,00	68,02	585.001.441.862,00	26,63

Gambar 3.6  
Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah



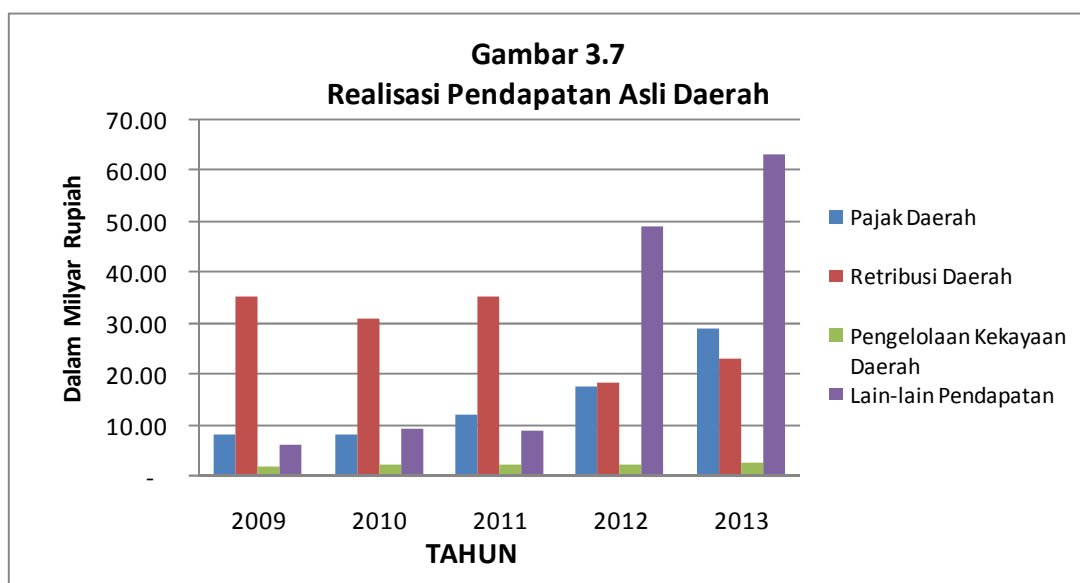


Dari Gambar diatas, terlihat pula bahwa komponen Dana Perimbangan masih sangat dominan dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis, yaitu mencapai diatas 70 % setiap tahunnya, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah, berkisar antara 17 - 26 %. Secara rinci realisasi pendapatan daerah per komponen sumber penerimaan selama kurun waktu 2009-2013 adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah; terdiri dari Pajak Daerah, retribusi daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Relisasi selama kurun waktu 2009-2013 sebagaimana tabel 3.4, dan Gambar 3.7.

**Tabel 3.4**  
**Perkembangan Realisasi PAD Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2009-2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pajak Daerah	8.188.803.593,00	8.148.030.206,00	12.312.800.086,00	17.718.419.272,00	28.824.967.342,00
2	Retribusi Daerah	35.167.494.472,00	30.786.171.211,00	35.248.407.832,00	18.571.609.783,00	22.920.807.541,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	1.841.830.169,00	2.311.517.023,00	2.368.990.172,00	2.486.035.599,00	2.840.893.502,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	6.078.426.812,00	9.267.157.503,00	8.970.337.421,00	48.935.820.769,00	62.889.266.860,00
	<b>Jumlah PAD</b>	<b>51.276.555.046,00</b>	<b>50.512.875.943,00</b>	<b>58.900.535.511,00</b>	<b>87.711.885.423,00</b>	<b>117.475.935.245,00</b>



b. Dana Perimbangan; terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain. Realisasi dana perimbangan selama kurun waktu 2009-2013 sebagaimana terlihat pada tabel 3.5 dan gambar 3.8 berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2009-2013**

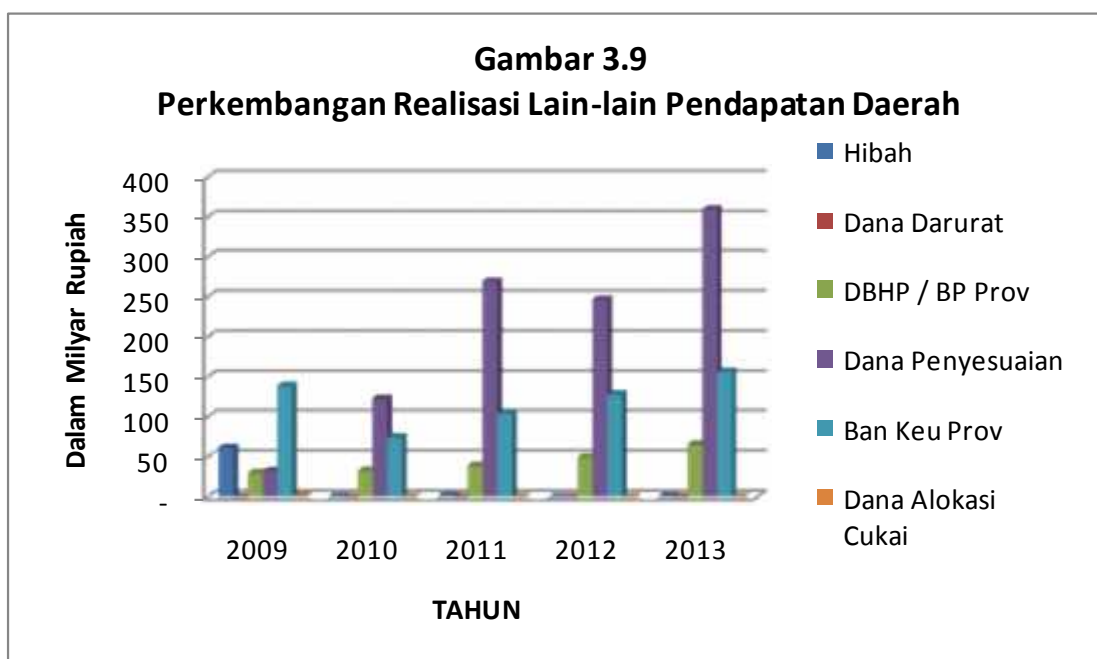
No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
2	Dana Perimbangan	1.030.099.884.133,00	1.035.710.000.785,00	1.123.613.689.708,00	1.353.385.828.508,00	1.494.016.559.741,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	67.801.353.133,00	76.055.375.785,00	85.310.853.708,00	98.691.164.508,00	94.496.352.741,00
2.2	Dana Alokasi Umum	858.175.531.000,00	867.400.725.000,00	953.056.836.000,00	1.165.043.374.000,00	1.303.907.527.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	104.123.000.000,00	92.253.900.000,00	85.246.000.000,00	89.651.290.000,00	95.612.680.000,00
2.4	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



c. Lain-lain Pendapatan Daerah; terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari Provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi, dan lain-lain pendapatan. Secara rinci realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.6 dan gambar 3.9. berikut

**Tabel 3.6**  
**Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2009-2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>266.230.036.113,00</b>	<b>232.400.422.020,00</b>	<b>417.281.399.749,00</b>	<b>426.237.864.194,00</b>	<b>585.001.441.862,00</b>
3.1	Pendapatan Hibah	62.319.688.000,00	1.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-	1.446.000.000,00
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
3.3	Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.291.422.096,00	33.248.280.580,00	39.690.796.954,00	49.982.711.594,00	65.875.605.182,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.939.400.000,00	123.118.118.400,00	269.880.250.440,00	247.286.806.000,00	360.372.972.000,00
3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	139.303.918.345,00	75.034.023.040,00	105.210.352.355,00	128.968.346.600,00	157.306.864.680,00
3.6	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-
3.7	Dana Alokasi Cukai	1.375.607.672,00	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.347.606.475.292,00	1.318.623.298.748,00	1.599.795.624.968,00	1.867.335.578.125,00	2.196.493.936.848,00



Dari keseluruhan komponen dan sumber pendapatan daerah, komponen dana perimbangan merupakan proporsi terbesar dalam pendapatan daerah. Sumber terbesar dari komponen ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Komponen kedua terbesar adalah Lain-lain pendapatan yang sah, dengan sumber terbesar berasal dari Pos Bantuan Keuangan dari Provinsi. Sedangkan terakhir adalah komponen PAD, dengan sumber terbesar dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Secara umum rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Ciamis periode tahun 2009-2013 sebesar 13,38 % dengan sumber pendapatan terbesar bersumber dari PAD sebesar 22,49 %, dana perimbangan sebesar 9,97 % dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 26,56 %.

Untuk lebih jelasnya rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Ciamis tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

**Tabel 3.7**  
**RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**TAHUN 2009-2013**

URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	RATA-RATA
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.347.606.475.292,00</b>	<b>1.318.623.298.748,00</b>	<b>1.599.795.624.968,00</b>	<b>1.867.335.578.125,00</b>	<b>2.196.493.936.848,00</b>	13,38
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>51.276.555.046,00</b>	<b>50.512.875.943,00</b>	<b>58.900.535.511,00</b>	<b>87.711.885.423,00</b>	<b>117.475.935.245,00</b>	24,49
Pendapatan Pajak Daerah	8.188.803.593,00	8.148.030.206,00	12.312.800.086,00	17.718.419.272,00	28.824.967.342,00	39,30
Pendapatan Retribusi Daerah	35.167.494.472,00	30.786.171.211,00	35.248.407.832,00	18.571.609.783,00	22.920.807.541,00	(5,46)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.841.830.169,00	2.311.517.023,00	2.368.990.172,00	2.486.035.599,00	2.840.893.502,00	11,80
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	6.078.426.812,00	9.267.157.503,00	8.970.337.421,00	48.935.820.769,00	62.889.266.860,00	130,82
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.030.099.884.133,00</b>	<b>1.035.710.000.785,00</b>	<b>1.123.613.689.708,00</b>	<b>1.353.385.828.508,00</b>	<b>1.494.016.559.741,00</b>	9,97
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	67.801.353.133,00	76.055.375.785,00	85.310.853.708,00	98.691.164.508,00	94.496.352.741,00	8,94
Dana Alokasi Umum	858.175.531.000,00	867.400.725.000,00	953.056.836.000,00	1.165.043.374.000,00	1.303.907.527.000,00	11,28
Dana Alokasi Khusus	104.123.000.000,00	92.253.900.000,00	85.246.000.000,00	89.651.290.000,00	95.612.680.000,00	(1,79)

<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>266.230.036.113,00</b>	<b>232.400.422.020,00</b>	<b>417.281.399.749,00</b>	<b>426.237.864.194,00</b>	<b>585.001.441.862,00</b>	26,56
Pendapatan Hibah	62.319.688.000,00	1.000.000.000,00	2.500.000.000,00	-	1.446.000.000,00	12,90
Dana Darurat	-	-	-	-	-	
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.291.422.096,00	33.248.280.580,00	39.690.796.954,00	49.982.711.594,00	65.875.605.182,00	21,72
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.939.400.000,00	123.118.118.400,00	269.880.250.440,00	247.286.806.000,00	360.372.972.000,00	107,58
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	139.303.918.345,00	75.034.023.040,00	105.210.352.355,00	128.968.346.600,00	157.306.864.680,00	9,66
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	
Dana Alokasi Cukai	1.375.607.672,00	-	-	-	-	(25,00)
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.347.606.475.292,00</b>	<b>1.318.623.298.748,00</b>	<b>1.599.795.624.968,00</b>	<b>1.867.335.578.125,00</b>	<b>2.196.493.936.848,00</b>	<b>13,38</b>

### 3.1.1.2. Belanja Daerah

Pada dasarnya belanja daerah dalam APBD diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara umum, pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas daerah yang disinergikan dengan program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat.

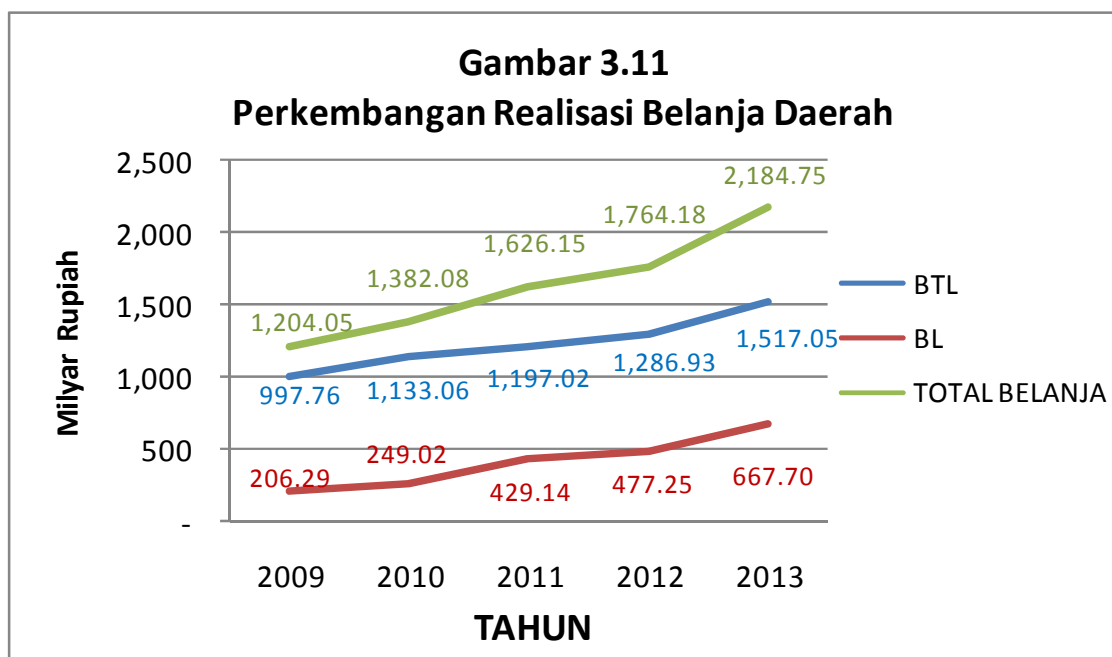
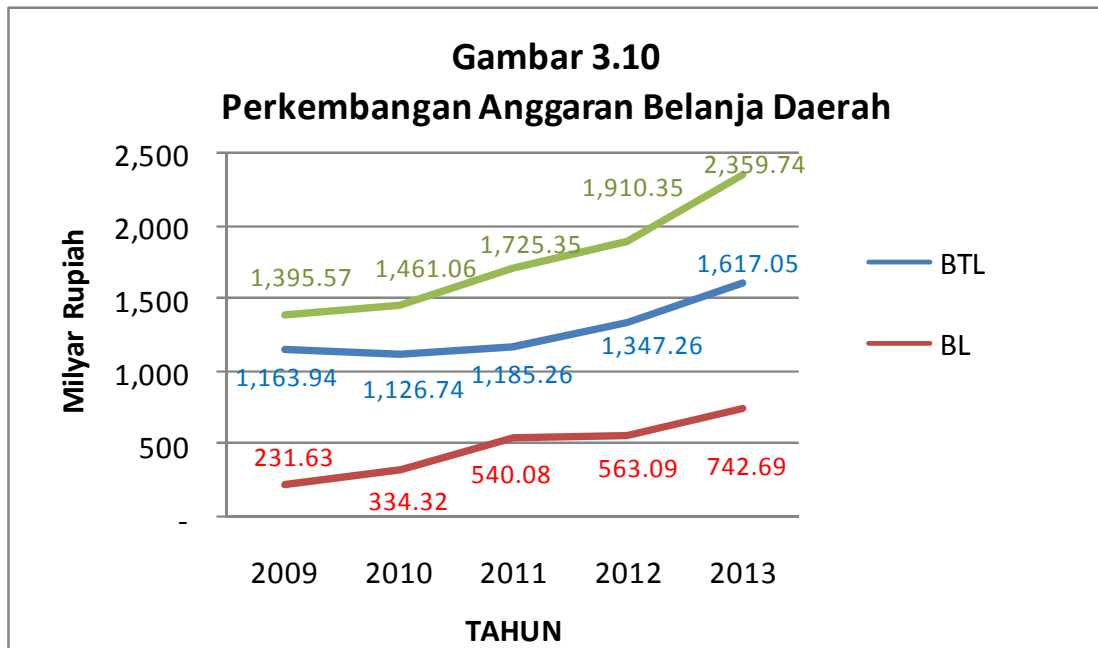
Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah, selama kurun waktu 2009-2013, belanja daerah pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti terlihat dalam tabel 3.8.

**Tabel 3.8**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ciamis**  
**TAHUN 2009-2013**

(Dalam Milyar Rupiah)

No	Tahun	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung			Jumlah		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2009	1.163,938	997,762	85,72	231,629	206,285	89,06	1.395,567	1.204,048	86,28
2	2010	1.126,739	1.133,056	100,56	334,323	249,022	74,49	1.461,063	1.382,078	94,59
3	2011	1.185,265	1.197,019	100,99	540,083	429,136	79,46	1.725,347	1.626,155	94,25
4	2012	1.347,259	1.286,926	95,52	563,086	477,253	84,76	1.910,346	1.764,179	92,35
5	2013	1.617,050	1.517,047	93,82	742,686	667,705	89,90	2.359,737	2.184,752	92,58

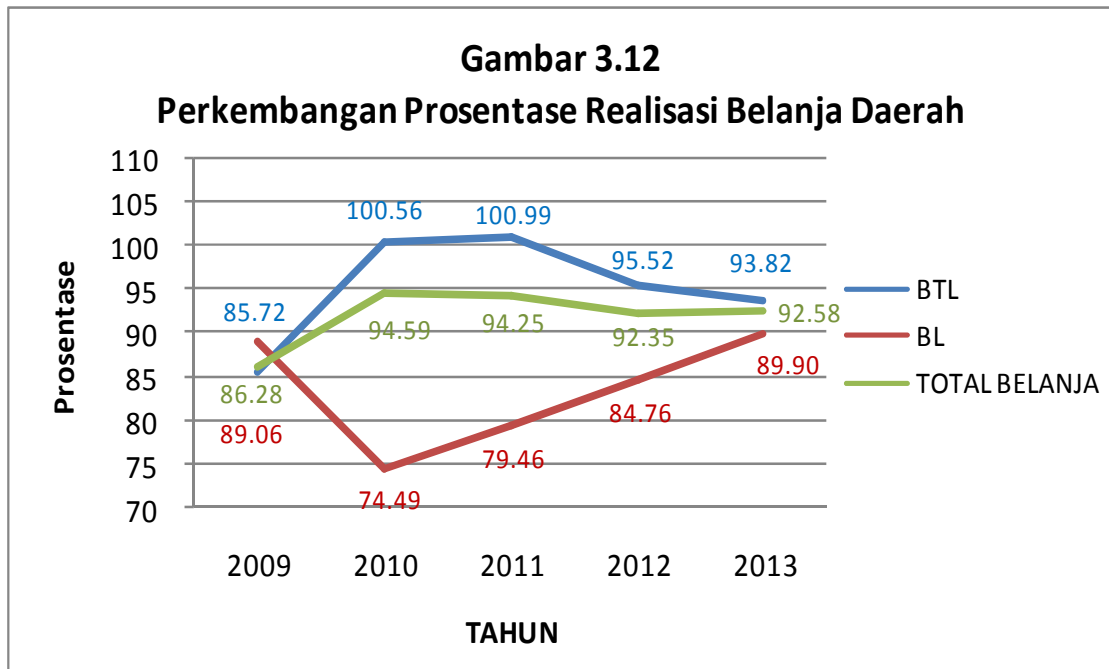
Belanja Tidak Langsung meningkat dari anggaran tahun 2009 sebesar Rp. 1,163 Trilyun dengan realisasi sebesar Rp. 997,762 Milyar, menjadi anggaran sebesar Rp. 1,617 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 1,517 Triliun pada tahun 2013; Belanja Langsung meningkat dari anggaran tahun 2009 sebesar Rp. 231,629 Milyar dengan realisasi sebesar Rp. 206,285 milyar, menjadi anggaran sebesar Rp. 742,686 milyar dengan relasasi sebesar Rp. 667,705 milyar pada tahun 2013 total belanja meningkat dari tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 1,395 Triliun dengan realisasi sebesar Rp. 1,204 Triliun, menjadi anggaran sebesar Rp. 2,359 Triliun dengan realisasi sebesar Rp 2,184 Triliun pada tahun 2013.



Menegenai perkembangan Prosentase Realisasi Belanja dapat dilihat pada Gambar 3.10 Selama kurun waktu 2009- 20113, Prosentase realisasi Belanja tidak Langsung selalu lebih besar dari Belanja Langsung. Secara keseluruhan realisasi belanja daerah mengalami fluktuasi yaitu dari 86,28 persen pada tahun 2009, naik menjadii 94,59 persen pada tahun 2010, turun lagi menjadi 94,25 persen pada



tahun 2011, kemudian turun lagi menjadi 92,35 persen pada tahun 2012 kemudian naik lagi menjadi 92,58 persen pada tahun 2013.

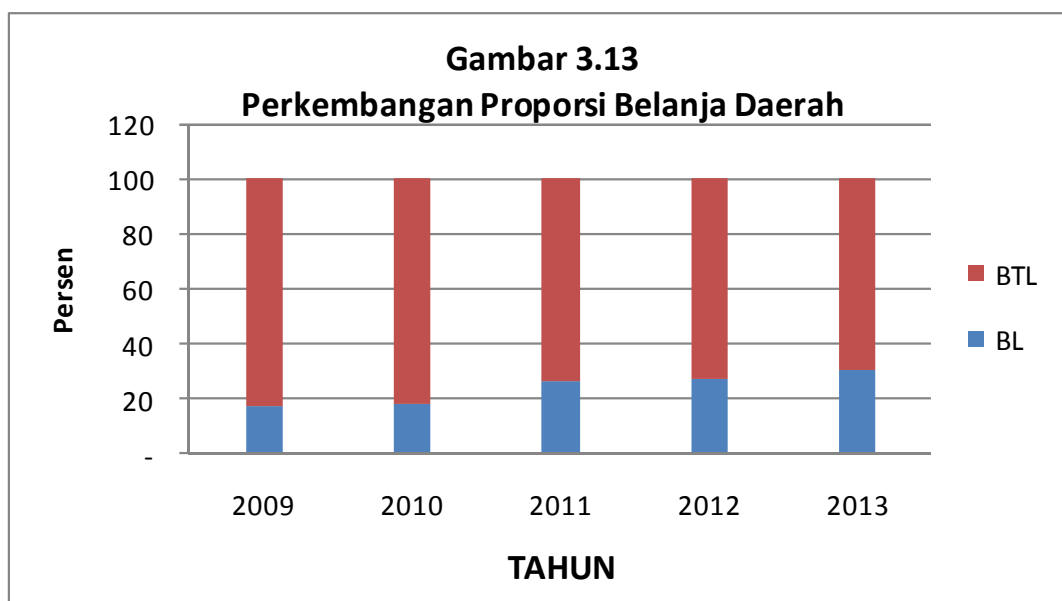


Dari Gambar 3.12 diatas juga terlihat selama kurun waktu 2009-2013, prosentase realisasi komponen Belanja langsung mencapai angka terendah yaitu 74,49 persen pada tahun 2010, turun dari tahun 2009 yang tercatat sebesar 89,06 persen kondisi ini berbeda dengan belanja tidak langsung, yang meningkat dari 85,72 persen pada tahun 2009 menjadi 100,56 persen pada tahun 2010.

Mangenai proporsi realisasi Belanja selama kurun waktu 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 3.9 dan Gambar 3.13.

**Tabel 3.9**  
**Perkembangan Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2009-2013**

No	Tahun	Belanja Tidak Langsung %	Belanja Langsung %	Total %
1	2009	82,87	17,13	100
2	2010	81,98	18,02	100
3	2011	73,61	26,39	100
4	2012	72,95	27,05	100
5	2013	69,44	30,56	100



Dari tabel dan gambar diatas terlihat bahwa selama kurun waktu 2009-2013, secara rata - rata tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan pada komposisi belanja daerah yaitu berkisar antara 76,17 persen untuk belanja tidak langsung dan 23,83 persen Belanja Langsung. Namun terjadi penurunan untuk belanja tidak langsung dan mengalami peningkatan untuk belanja langsung,

artinya bahwa kebijakan keuangan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam melayani kabutuhan publik/masyarakat.

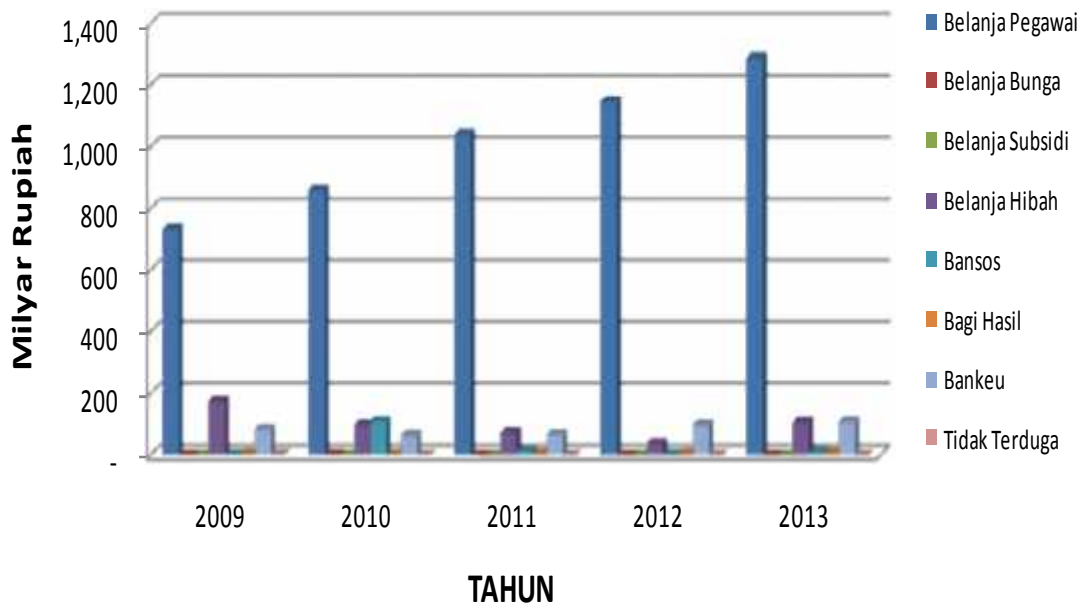
Secara rinci, perkembangan belanja daerah selama kurun waktu 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 3.10. yaitu sebagai berikut:

- a. Belanja tidak langsung; terdiri dari belanja pegawai, Belanja Bunga ,Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Balanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga ,dan Belanja Lain- lain.
- b. Belanja Langsung; terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa/ jasa; dan Belanja Modal.

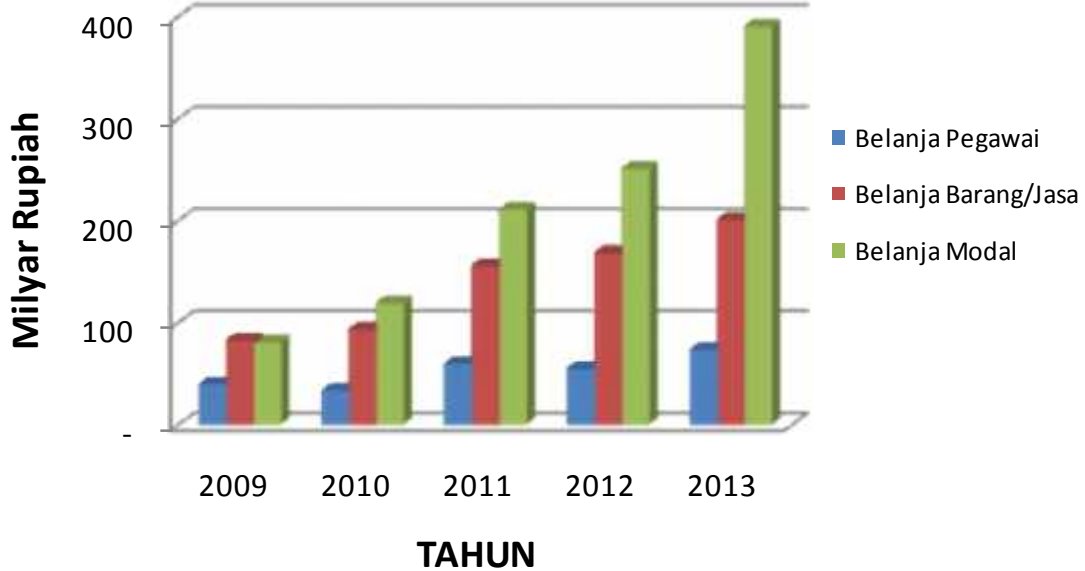
**Tabel 3.10**  
**Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2009-2013**

No	Uraian	2009			2010			2011			2012			2013		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
	<b>BELANJA DAERAH</b>	1.395,57	1.204,05	<b>86,28</b>	1.461,06	1.382,08	<b>94,59</b>	1.725,35	1.626,15	<b>94,25</b>	1.910,35	1.764,18	<b>92,35</b>	2.359,74	2.184,75	<b>92,58</b>
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	1.163,94	997,76	<b>85,72</b>	1.126,74	1.133,06	<b>100,56</b>	1.185,26	1.197,02	<b>100,99</b>	1.347,26	1.286,93	<b>95,52</b>	1.617,05	1.517,05	<b>93,82</b>
1	Belanja Pegawai	771,96	732,49	94,89	838,39	860,63	102,65	1.027,04	1.041,24	101,38	1.200,51	1.147,15	95,56	1.370,60	1.288,38	94,00
2	Belanja Bunga	0,18	0,17	96,56	0,70	0,58	83,16	-	-		-	-		-	-	
3	Belanja Subsidi	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
4	Belanja Hibah	188,68	175,45	92,99	107,84	97,87	90,75	73,37	72,59	98,94	37,52	36,50	97,28	109,09	105,50	96,70
5	Belanja Bantuan Sosial	113,73	2,08	1,83	113,19	109,77	96,97	13,61	12,86	94,49	5,41	1,67	30,85	12,20	9,89	81,11
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3,15	3,12	99,21	1,95	1,14	58,30	4,00	3,90	97,52	4,00	3,82	95,53	5,91	5,33	90,18
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	83,75	83,48	99,67	63,67	63,06	99,06	66,75	66,43	99,53	97,91	97,78	99,87	109,61	107,77	98,32
8	Belanja Tidak Terduga	2,50	0,97	38,72	1,00	-	-	0,50	-	-	1,91	-	-	9,65	0,18	1,88
9	Lain-lain	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
	<b>Belanja Langsung</b>	231,63	206,29	<b>89,06</b>	334,32	249,02	<b>74,49</b>	540,08	429,14	<b>79,46</b>	563,09	477,25	<b>84,76</b>	742,69	667,70	<b>89,90</b>
1	Belanja Pegawai	44,13	40,66	92,15	41,32	34,39	83,23	62,97	60,66	96,32	61,42	56,06	91,27	81,07	74,49	91,88
2	Belanja Barang Dan Jasa	93,09	83,74	89,96	101,19	94,53	93,42	163,43	156,63	95,84	190,52	169,36	88,89	231,27	201,82	87,27
3	Belanja Modal	94,42	81,88	86,72	191,81	120,10	62,61	313,68	211,85	67,54	311,15	251,84	80,94	430,35	391,40	90,95

**Gambar 3.14**  
**Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung**



**Gambar 3.15**  
**Perkembangan Realisasi Belanja Langsung**



### 3.1.1.3. Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari SilPA Tahun Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah.

Secara rinci Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut ini.

**Tabel 3.11**  
**Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2009-2013**

(Milyar Rupiah)

No	Uraian	2009			2010			2011			2012			2013		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>40,210</b>	<b>19,603</b>	<b>48,75</b>	<b>153,121</b>	<b>156,134</b>	<b>101,97</b>	<b>149,121</b>	<b>86,621</b>	<b>58,09</b>	<b>34,019</b>	<b>41,019</b>	<b>120,58</b>	<b>147,675</b>	<b>150,075</b>	<b>101,63</b>
	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>46,002</b>	<b>25,387</b>	<b>55,19</b>	<b>163,162</b>	<b>163,162</b>	<b>100,00</b>	<b>157,679</b>	<b>92,679</b>	<b>58,78</b>	<b>60,261</b>	<b>60,261</b>	<b>100,00</b>	<b>154,175</b>	<b>154,175</b>	<b>100,00</b>
1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	25,387	25,387	100,00	163,162	163,162	100,00	92,679	92,679	100,00	60,261	60,261	100,00	144,175	144,175	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	10,000	10,000	100,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	20,615	-	0,00	-	-	0,00	65,000	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
6	Penerimaan Piutang daerah	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>5,792</b>	<b>5,784</b>	<b>99,86</b>	<b>10,041</b>	<b>7,028</b>	<b>69,99</b>	<b>8,559</b>	<b>6,059</b>	<b>70,79</b>	<b>26,242</b>	<b>19,242</b>	<b>73,33</b>	<b>6,500</b>	<b>4,100</b>	<b>63,08</b>
1	Pembentukan dana Cadangan	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	10,000	10,000	100,00	-	-	0,00
2	Penyertaan Modal (investasi) Pem Daerah	4,000	4,000	100,00	6,500	4,500	69,23	8,500	6,000	<b>70,59</b>	16,200	9,200	56,79	6,500	4,100	63,08
3	Pembayaran Pokok Utang	1,792	1,784	99,55	3,300	2,346	71,08	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
	Pembayaran Dana Pihak Ke Tiga	-	-	0,00	0,241	0,182	75,53	0,059	0,059	100,00	0,042	0,042	100,00	-	-	0,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>40,210</b>	<b>19,603</b>	<b>48,75</b>	<b>153,121</b>	<b>156,134</b>	<b>101,97</b>	<b>149,121</b>	<b>86,621</b>	<b>58,09</b>	<b>34,019</b>	<b>41,019</b>	<b>120,58</b>	<b>147,675</b>	<b>150,075</b>	<b>101,63</b>
	<b>SILPA Tahun berkenaan</b>		<b>163,162</b>			<b>92,679</b>			<b>60,261</b>		-	<b>144,175</b>			<b>161,817</b>	

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa selama periode tahun 2009-2013, pembiayaan daerah mengalami fluktuasi yang puncaknya mencapai tertinggi pada tahun 2012 dengan rata-rata mencapai 86,20 %.

### 3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi asset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi asset, kewajiban dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut ditunjukkan dalam sub-sub rekening yang lebih rinci.

Neraca daerah sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel 3.12 sebagai berikut:



**Tabel 3.12**  
**NERACA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**PER 31 DESEMBER TAHUN 2009-2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	RATA-RATA
<b>1</b>	<b>ASET LANCAR</b>						
	<b>Kas</b>	<b>163.337.716.955,00</b>	<b>92.780.034.224,00</b>	<b>60.363.039.699,00</b>	<b>144.592.512.522,00</b>	<b>161.939.471.446,00</b>	<b>18,35</b>
	Kas di Kas Daerah	162.496.340.450,00	92.601.560.287,00	60.100.810.923,00	144.166.404.353,00	161.817.407.979,00	18,50
	Kas di Bendahara Pengeluaran	742.233.105,00	80.480.225,00	185.593.776,00	51.298.998,00	45.538.767,00	(10,53)
	Kas di Bendahara Penerimaan	99.143.400,00	97.993.712,00	76.635.000,00	374.809.171,00	76.524.700,00	71,64
	Kas di BUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Investasi Jangka Pendek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Piutang</b>	<b>3.438.240.700,00</b>	<b>9.870.315.328,00</b>	<b>13.320.265.698,00</b>	<b>19.161.773.234,00</b>	<b>24.063.790.568,90</b>	<b>72,87</b>
	Piutang Pajak	33.164.602,00	556.977.335,00	557.443.456,00	129.299.477,00	245.239.990,00	398,10
	Piutang Retribusi	1.025.258.888,00	574.948.818,00	374.594.506,00	5.555.640.135,00	11.788.963.541,00	354,13
	Piutang Dana Bagi Hasil	2.022.610.657,00	4.537.845.295,00	9.685.857.171,00	11.767.989.309,00	10.379.647.508,00	61,88
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	61.490.000,00	62.420.000,00	61.662.000,00	60.527.000,00	
	Bagian lancar Tuntutan Perbendaharaan	0,00	4.536.037,00	8.926.900,00	14.872.526,00	20.818.152,00	
	Bagian Lancar Piutang TGR	303.508.553,00	357.219.270,00	388.832.262,00	541.191.878,00	536.494.116,90	16,22
	Piutang Lainnya	53.698.000,00	3.777.298.573,00	2.242.191.403,00	1.091.117.909,00	1.032.100.261,00	1.709,24
	<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Persediaan</b>	<b>10.295.983.328,00</b>	<b>12.870.948.097,00</b>	<b>15.023.745.758,00</b>	<b>13.793.158.348,00</b>	<b>15.662.409.549,00</b>	<b>11,77</b>
	Persediaan Habis Pakai	463.927.759,00	695.272.417,00	1.844.549.327,00	1.284.273.060,00	1.345.621.983,00	47,39
	Persediaan Tak Habis Pakai	7.868.050,00	3.163.000,00	69.912.150,00	1.537.900,00	31.916.109,00	982,00
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	9.824.187.519,00	12.172.512.680,00	13.109.284.281,00	12.507.347.388,00	14.284.871.457,00	10,30
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>177.071.940.983,00</b>	<b>115.521.297.649,00</b>	<b>88.707.051.155,00</b>	<b>177.547.444.104,00</b>	<b>201.665.671.563,90</b>	<b>13,94</b>

<b>2</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
	<b>Investasi Non Permanen</b>						
	Investasi Dana Bergulir	4.683.141.000,00	2.475.650.704,00	39.357.861,00	65.111.861,00	0,00	(45,03)
	<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>4.683.141.000,00</b>	<b>2.475.650.704,00</b>	<b>39.357.861,00</b>	<b>65.111.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(45,03)</b>
	<b>Investasi Permanen</b>						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	33.702.072.087,00	37.708.806.907,00	43.134.973.335,00	59.146.064.693,00	65.441.893.284,70	18,51
	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>33.702.072.087,00</b>	<b>37.708.806.907,00</b>	<b>43.134.973.335,00</b>	<b>59.146.064.693,00</b>	<b>65.441.893.284,70</b>	<b>18,51</b>
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>38.385.213.087,00</b>	<b>40.184.457.611,00</b>	<b>43.174.331.196,00</b>	<b>59.211.176.554,00</b>	<b>65.441.893.284,70</b>	<b>14,95</b>
<b>3</b>	<b>ASET TETAP</b>						
	Tanah	341.763.329.747,00	361.194.366.342,00	362.796.187.449,00	362.444.660.490,00	321.464.755.650,00	(1,32)
	Gedung dan Bangunan	936.680.135.755,00	972.865.153.696,00	1.026.027.384.705,00	1.153.326.703.029,00	1.218.912.526.181,00	6,86
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.902.980.857.378,00	1.984.774.123.967,00	2.059.338.739.073,00	2.120.132.437.294,00	2.314.065.022.256,00	5,04
	Peralatan dan Mesin	248.823.378.002,00	298.936.219.627,00	347.325.841.980,00	413.451.703.610,00	437.264.364.483,94	15,28
	Aset tetap lainnya	31.711.342.724,00	42.052.362.547,00	74.279.253.979,00	85.063.556.556,00	86.291.901.277,00	31,30
	Konstruksi dalam pengerjaan	4.820.151.051,00	2.979.433.100,00	2.894.542.200,00	2.894.542.200,00	0,00	(35,26)
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>3.466.779.194.657,00</b>	<b>3.662.801.659.279,00</b>	<b>3.872.661.949.386,00</b>	<b>4.137.313.603.179,00</b>	<b>4.377.998.569.847,94</b>	<b>6,01</b>
<b>4</b>	<b>DANA CADANGAN</b>						
	Dana Cadangan	98.427.387,00	99.561.236,00	0,00	10.003.268.686,00	1.135.768,00	
	<b>Jumlah Dana Cadangan</b>	<b>98.427.387,00</b>	<b>99.561.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003.268.686,00</b>	<b>1.135.768,00</b>	
<b>5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>						
	Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Perbendaharaan	0,00	19.323.285,00	13.377.659,00	7.432.033,00	1.486.407,00	
	Bagian Jangka Panjang Piutang TGR	1.401.190.662,00	1.350.229.945,00	1.315.898.205,00	1.288.492.155,00	1.267.469.233,00	(2,47)
	Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	0,00	26.540.000,00	15.345.000,00	40.550.000,00	78.800.000,00	
	Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	141.120.000,00	126.560.000,00	113.120.000,00	99.680.000,00	
	Piutang BPR/BKPD/LPK BBU	9.550.593.692,00	1.041.829.859,00	7.481.542.445,00	7.481.542.445,00	7.481.542.445,00	132,26
	Piutang Dakabalarea	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.730.739,00	
	Aset Lain-lain	0,00	66.475.310.629,00	45.502.084.778,00	7.803.451.908,00	114.253.754.689,50	
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>10.951.784.354,00</b>	<b>69.054.353.718,00</b>	<b>54.454.808.087,00</b>	<b>16.734.588.541,00</b>	<b>125.327.463.513,50</b>	<b>272,26</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3.693.286.560.468,00</b>	<b>3.887.661.329.493,00</b>	<b>4.058.998.139.824,00</b>	<b>4.400.810.081.064,00</b>	<b>4.770.434.733.978,04</b>	<b>6,62</b>

II	<b>KEWAJIBAN</b>						
1	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	20.759.425,00	1.366.500,00	721.250,00	18.815.003,00	41.976.943,00	622,78
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	2.997.513.871,00	1.275.091.721,00	1.275.091.721,00	1.275.091.721,00	1.317.982.940,00	(13,52)
	Penerimaan Diterima Dimuka	49.583.333,00	32.083.333,00	14.583.333,00	254.813.055,00	310.412,00	364,39
	Utang kepada PT. Askes	0,00	28.271.479.060,00	37.772.236.335,00	49.264.167.759,00	48.477.315.649,00	
	Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU	0,00	0,00	8.638.265.515,00	8.638.265.515,00	8.638.265.515,00	
	Utang Lainnya	42.873.471,00	334.374.603,00	227.647.998,00	2.365.252.641,00	8.328.672.081,00	459,78
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>3.110.730.100,00</b>	<b>29.914.395.217,00</b>	<b>47.928.546.152,00</b>	<b>61.816.405.694,00</b>	<b>66.804.523.540,00</b>	<b>239,73</b>
2	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>						
	Utang Dalam Negeri	10.553.172.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>10.553.172.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>13.663.902.475,00</b>	<b>29.914.395.217,00</b>	<b>47.928.546.152,00</b>	<b>61.816.405.694,00</b>	<b>66.804.523.540,00</b>	<b>54,05</b>
III	<b>Ekuitas Dana</b>						
1	<b>Ekuitas Dana Lancar</b>						
	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	163.161.596.832,00	92.679.416.701,00	60.261.399.594,00	144.175.496.317,00	161.817.407.979,00	18,33
	Pendapatan Yang Ditangguhkan	112.487.227,00	98.297.923,00	100.918.855,00	398.201.202,00	80.086.524,00	51,18
	Cadangan Piutang	3.438.240.700,00	9.870.315.328,00	13.320.265.698,00	19.161.773.234,00	24.063.790.568,90	72,87
	Cadangan Persediaan	10.295.983.328,00	12.870.948.097,00	15.023.745.758,00	13.793.158.348,00	15.662.409.549,00	11,77
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran utang jk. Pendek	(3.047.097.204,00)	(29.912.075.617,00)	(47.927.824.902,00)	(61.797.590.691,00)	(66.762.546.597,00)	244,72
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>173.961.210.883,00</b>	<b>85.606.902.432,00</b>	<b>40.778.505.003,00</b>	<b>115.731.038.410,00</b>	<b>134.861.148.023,90</b>	<b>24,29</b>
2	<b>Ekuitas Dana investasi</b>						
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	38.385.213.087,00	40.184.457.611,00	43.174.331.196,00	59.211.176.554,00	65.441.893.284,70	14,95
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3.466.779.194.657,00	3.662.801.659.279,00	3.872.661.949.386,00	4.137.313.603.179,00	4.377.998.569.847,94	6,01
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	10.951.784.354,00	69.054.353.718,00	54.454.808.087,00	16.734.588.541,00	125.327.463.513,50	272,26
	Dana Yang harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(10.553.172.375,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>3.505.563.019.723,00</b>	<b>3.772.040.470.608,00</b>	<b>3.970.291.088.669,00</b>	<b>4.213.259.368.274,00</b>	<b>4.568.767.926.646,14</b>	<b>6,85</b>
3	<b>Ekuitas Dana Cadangan</b>						
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	98.427.387,00	99.561.236,00	0,00	10.003.268.686,00	1.135.768,00	
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Cadangan</b>	<b>98.427.387,00</b>	<b>99.561.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.003.268.686,00</b>	<b>1.135.768,00</b>	
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>3.679.622.657.993,00</b>	<b>3.857.746.934.276,00</b>	<b>4.011.069.593.672,00</b>	<b>4.338.993.675.370,00</b>	<b>4.703.630.210.438,04</b>	<b>6,35</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>3.693.286.560.468,00</b>	<b>3.887.661.329.493,00</b>	<b>4.058.998.139.824,00</b>	<b>4.400.810.081.064,00</b>	<b>4.770.434.733.978,04</b>	<b>6,62</b>

### 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2009-2013

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui system yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK). Namun dalam penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2009-2013 ini, data yang digunakan terkait dengan APBD tahun 2009-2013 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sedangkan untuk APBD Tahun 2013 belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK.

#### a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Selama Periode Tahun Anggaran 2009-2013, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui :

- (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah;
- (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah;
- (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan professional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan
- (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain :

1. Memantapkan kelembagaan dan system operasional pungutan pendapatan daerah.

2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan.
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan OPD penghasil.
5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
6. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
7. Meningkatkan peran dan fungsi OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
8. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
9. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan system administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
10. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumberdaya pegawai yang professional dan bermoral, serta mengembangkan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berdasarkan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2009-2013, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2009-2013 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM dan MDGs. Untuk itu, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM dan MDGs guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2009-2013 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang professional, efisien dan efektif, antara lain :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Ciamis yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah.
2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% % dari volume APBD tiap tahunnya.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi kesehatan secara bertahap sebesar 10 % dari volume APBD tiap tahunnya.
4. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur minimal 10 % dari total PKB, PBBKB, dan BBNKB sesuai Pasal 8 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah.
5. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.

6. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan pada wilayah serta produksi dipedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan ciamis, pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam.
8. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost) dan pelayanan dasar OPD.
9. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif pada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi pada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
  - c) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk mengarahkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk emningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - d) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
  - e) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- f) Mengalokasikan belanja bagi hasil pada Kabupaten dan Kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten dan Kota sesuai ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil yang dilaksanakan secara profesional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah.
- g) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan pemerintah desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan pemerintah desadialihkan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat.

#### c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi : (a) penerimaan pembiayaan, (b) pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemenuhan belanja yang mengalami deficit anggaran sebagai akibat dari proporsi pendapatan yang lebih kecil yang dibandingkan dengan kebutuhan belanja. Disamping itu arah kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan pada pemenuhan belanja investasi yaitu dengan peningkatan penyertaan modal BUMD serta penyediaan dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilukada tahun 2013.

#### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan keuangan tersebut di atas yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah, maka untuk mengetahui kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan lima tahun kedepan dalam rangka meningkatkan



kapasitas pendanaan pembangunan daerah, hendaknya diketahui pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan tahun sebelumnya.

Gambaran realisasi dari pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2009-2013 antara lain adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013**

(Milyar Rupiah)

No	Uraian	2009			2010			2011			2012			2013		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.395,567</b>	<b>1.204,048</b>	<b>86,28</b>	<b>1.461,063</b>	<b>1.382,078</b>	<b>94,59</b>	<b>1.725,347</b>	<b>1.626,155</b>	<b>94,25</b>	<b>1.910,346</b>	<b>1.764,179</b>	<b>92,35</b>	<b>2.359,737</b>	<b>2.184,752</b>	<b>92,58</b>
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.163,938</b>	<b>997,762</b>	<b>85,72</b>	<b>1.126,739</b>	<b>1.133,056</b>	<b>100,56</b>	<b>1.185,265</b>	<b>1.197,019</b>	<b>100,99</b>	<b>1.347,259</b>	<b>1.286,926</b>	<b>95,52</b>	<b>1.617,050</b>	<b>1.517,047</b>	<b>93,82</b>
1	Belanja Pegawai	771,955	732,487	94,89	838,386	860,631	102,65	1.027,041	1.041,235	101,38	1.200,508	1.147,155	95,56	1.370,596	1.288,383	94,00
2	Belanja Bunga	0,176	0,169	96,56	0,700	0,582	83,16	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
3	Belanja Subsidi	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
4	Belanja Hibah	188,680	175,454	92,99	107,842	97,872	90,75	73,372	72,593	98,94	37,524	<b>36,503</b>	97,28	109,091	105,495	96,70
5	Belanja Bantuan Sosial	113,727	2,083	1,83	113,195	109,769	96,97	13,606	12,857	94,49	5,409	<b>1,669</b>	30,85	12,196	9,893	81,11
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3,147	3,122	99,21	1,950	1,137	58,30	4,000	3,901	97,52	4,000	<b>3,821</b>	95,53	5,909	5,328	90,18
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	83,754	83,480	99,67	63,666	63,065	99,06	66,746	66,434	99,53	97,910	97,780	99,87	109,608	107,766	98,32
8	Belanja Tidak Terduga	2,500	0,968	38,72	1,000	-	-	0,500	-	-	1,910	-	-	9,650	0,182	1,88
9	Lain-lain	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>231,629</b>	<b>206,285</b>	<b>89,06</b>	<b>334,323</b>	<b>249,022</b>	<b>74,49</b>	<b>540,083</b>	<b>429,136</b>	<b>79,46</b>	<b>563,086</b>	<b>477,253</b>	<b>84,76</b>	<b>742,686</b>	<b>667,705</b>	<b>89,90</b>
1	Belanja Pegawai	44,125	40,663	92,15	41,323	34,392	83,23	62,975	60,658	96,32	61,418	56,057	91,27	81,065	74,486	91,88
2	Belanja Barang Dan Jasa	93,086	83,741	89,96	101,191	94,530	93,42	163,428	156,630	95,84	190,523	169,358	88,89	231,271	201,823	87,27
3	Belanja Modal	94,418	81,882	86,72	191,809	120,099	62,61	313,680	211,848	67,54	311,146	251,838	80,94	430,350	391,395	90,95

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa proporsi penggunaan realisasi belanja daerah dibandingkan dengan anggaran belanja daerah mengalami fluktuasi dikisaran antara 86 - 94 % tiap tahunnya.

Sementara itu analisis proporsi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur periode tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut :

**Tabel 3.14**  
**Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>740.862.800.292,00</b>	<b>860.631.467.951,00</b>	<b>1.041.235.446.436,00</b>	<b>1.145.038.532.112,00</b>	<b>1.286.295.790.280,00</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	708.931.304.130,00	752.883.491.474,00	818.281.270.635,00	888.077.366.930,00	932.148.322.124,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	27.109.074.476,00	101.993.586.094,00	216.902.763.400,00	251.687.890.640,00	348.107.548.990,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/Wakil KDH	2.844.961.500,00	3.150.999.600,00	3.171.999.600,00	2.919.999.600,00	4.179.999.600,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	1.977.460.186,00	2.603.390.783,00	2.879.412.801,00	2.353.274.942,00	1.859.919.566,00
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>131.518.642.385,00</b>	<b>177.227.633.597,00</b>	<b>270.170.947.009,00</b>	<b>329.804.006.454,00</b>	<b>495.531.576.878,00</b>
1	Belanja Honorarium PNS	23.847.221.416,00	27.340.265.468,00	32.885.686.724,00	44.974.304.809,00	61.153.219.249,00
2	Belanja Uang Lembur	1.291.387.500,00	829.518.500,00	618.936.500,00	586.388.000,00	1.083.938.150,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	119.125.000,00	45.250.000,00	100.250.000,00	19.545.000,00	32.217.680,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	2.032.039.000,00	64.569.000,00	-	1.806.931.100,00
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	561.852.250,00	695.358.200,00	827.183.500,00	728.154.350,00	625.756.000,00
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	787.382.269,00	800.239.919,00	846.057.673,00	880.933.707,00	765.236.910,00
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	322.220.000,00	2.896.912.460,00	207.950.000,00	207.993.500,00	3.010.659.759,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	386.335.250,00	445.547.326,00	334.726.300,00	874.867.850,00	866.517.450,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	18.030.271.800,00	20.591.908.237,00	22.437.839.507,00	29.694.197.107,00	34.792.071.870,00
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	456.130.000,00	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	4.291.228.500,00	995.000.000,00	-	-	-
12	Belanja Modal	81.881.618.400,00	120.099.464.487,00	211.847.747.805,00	251.837.622.131,00	391.395.028.710,00
<b>Total</b>		<b>872.381.442.677,00</b>	<b>1.037.859.101.548,00</b>	<b>1.311.406.393.445,00</b>	<b>1.474.842.538.566,00</b>	<b>1.781.827.367.158,00</b>

**Tabel 3.15**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013**

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	%
1	Tahun Anggaran 2009	872.381.442.677,00	1.209.831.557.676,00	72,11
2	Tahun Anggaran 2010	1.037.859.101.548,00	1.389.105.478.879,00	74,71
3	Tahun Anggaran 2011	1.311.406.393.445,00	1.632.213.642.075,00	80,35
4	Tahun Anggaran 2012	1.474.842.538.566,00	1.783.421.481.402,00	82,70
5	Tahun Anggaran 2013	1.781.827.367.158,00	2.188.852.025.186,00	81,40

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir total belanja daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur tiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2010, prosentasi total belanja untuk pemenuhan kebutuhan sebesar 74,71 %, tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 80,35 %, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sekitar 2 % menjadi 82,70 % sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 81,40 %. Hal ini mencerminkan bahwa postur pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang sangat signifikan serta mengalami peningkatan dalam memenuhi kebutuhan publik. Artinya terjadi peningkatan pemenuhan kebutuhan belanja untuk kepentingan pelayanan publik yakni belanja dipergunakan untuk pembangunan menampakkan peningkatan dan terjadi penurunan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai/ aparatur, hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah pusat dalam penerimaan pegawai dilakukan pengurangan.

Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan meningkat serta prioritas utama.

**Tabel 3.16**  
**Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013**

No	Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
<b>A.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>977.052.218.616,00</b>	<b>1.028.459.003.672,00</b>	<b>977.236.918.124,00</b>	<b>1.030.769.286.067,00</b>	<b>1.164.992.880.231,00</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	708.931.304.130,00	752.883.491.474,00	818.281.270.635,00	888.077.366.930,00	932.148.322.124,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/Wakil KDH	2.844.961.500,00	3.150.999.600,00	3.171.999.600,00	2.919.999.600,00	4.179.999.600,00
3	Belanja Bunga	169.460.938,00	582.135.864,00	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	175.454.095.108,00	97.871.925.814,00	72.592.615.000,00	36.502.500.000,00	105.495.214.250,00
6	Belanja Bantuan Sosial	2.082.882.400,00	109.768.720.000,00	12.856.731.779,00	1.668.695.932,00	9.892.748.526,00
7	Belanja Bagi Hasil	3.121.913.115,00	1.136.905.920,00	3.900.713.110,00	3.821.094.955,00	5.328.482.535,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	83.479.680.025,00	63.064.825.000,00	66.433.588.000,00	97.779.628.650,00	107.766.261.775,00
9	Belanja Tidak Terduga	967.921.400,00	-	-	-	181.851.421,00
<b>B.</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>15.315.243.028,00</b>	<b>16.234.457.745,00</b>	<b>20.680.846.413,00</b>	<b>30.105.290.363,00</b>	<b>40.962.060.467,00</b>
1	Belanja Honorarium PNS khusus untu guru dan tenaga medis	7.013.719.641,00	7.054.340.660,00	10.061.653.254,00	16.977.016.759,00	26.045.150.699,00
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	119.125.000,00	45.250.000,00	100.250.000,00	19.545.000,00	32.217.680,00
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	6.014.177.129,00	6.932.010.615,00	8.145.663.759,00	8.571.190.054,00	10.326.152.538,00
4	Belanja Sewa gedung kantor	1.596.641.258,00	1.445.218.970,00	1.659.554.400,00	3.554.356.050,00	3.664.093.050,00
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	571.580.000,00	757.637.500,00	713.725.000,00	983.182.500,00	894.446.500,00
<b>C.</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	<b>1.783.860.733,00</b>	<b>2.345.772.500,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>-</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	10.000.000.000,00	-
2	Pembayaran Pokok Utang	1.783.860.733,00	2.345.772.500,00	-	-	-
<b>Total (A+B+C)</b>		<b>994.151.322.377,00</b>	<b>1.047.039.233.917,00</b>	<b>997.917.764.537,00</b>	<b>1.070.874.576.430,00</b>	<b>1.205.954.940.698,00</b>

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

**Tabel 3.17**  
**Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2013**

No	Uraian	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)
1	Pendapatan Daerah	1.576.226.705.135,00	1.876.326.521.303,00	2.212.061.140.549,00
	Dikurangi :			
2	Belanja Daerah	1.725.347.236.636,00	1.910.345.553.897,00	2.359.736.636.866,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.558.885.200,00	26.242.367.000,00	6.500.000.000,00
A	Defisit Riil	(157.679.416.701,00)	(60.261.399.594,00)	(154.175.496.317,00)
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan :			
4	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	92.679.416.701,00	60.261.399.594,00	144.175.496.317,00
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	10.000.000.000,00
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	65.000.000.000,00	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
B	Total Penerimaan Pembiayaan Daerah	157.679.416.701,00	60.261.399.594,00	154.175.496.317,00

**Tabel 3.18**  
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2013**

No	Uraian	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)
1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	92.679.416.701,00	60.261.399.594,00	144.175.496.317,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	10.000.000.000,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			

**Tabel 3.19**  
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2013**

No	Uraian	2011		2012		2013		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Jumlah SILPA	92.679.416.701,00	100,00	60.261.399.594,00	100,00	144.175.496.317,00	100,00	52,14
2	Pelampauan Penerimaan PAD	(5.253.333.084,00)	91,81	5.994.388.214,00	107,34	10.280.753.607,00	109,59	(71,30)
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	25.010.853.708,00	102,28	19.345.998.008,00	101,45	14.515.989.153,00	100,98	(23,81)
4	Pelampauan Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	3.811.399.209,00	100,92	(34.331.329.400,00)	92,55	(40.363.946.461,00)	93,55	(491,59)
5	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	99.192.479.761,00	94,25	146.166.439.495,00	92,35	174.984.611.680,00	92,58	33,54
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Tabel 3.20**  
**Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2013**

No	Uraian	2011 (audited) (Rp.)	2012 (audited) (Rp.)	2013 (un audited) (Rp.)
1	Saldo neraca daerah	4.058.998.139.824,00	4.400.810.081.064,00	4.770.434.733.978,00
	Dikurangi :			
2	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan/Kewajiban Jangka Pendek	47.928.546.152,00	61.816.405.694,00	66.804.523.540,00
3	Kegiatan Lanjutan	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran/Pembiayaan	86.620.531.501,00	41.019.032.594,00	150.075.496.317,00

### 3.2.3 Analisis Neraca Daerah

Neraca Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2009-2013 dijelaskan sebagai berikut:

#### 3.2.3.1 Aset Daerah

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) Aset Lancar, (2) investasi jangka panjang (3) aset tetap, (4) dana cadangan dan, (5) aset lainnya.

Perkembangan aset Kabupaten Ciamis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Per 31 Desember 2013 kebutuhan Kabupaten Ciamis memiliki aset senilai Rp. 4.770.434.733.978,04 atau rata-rata terjadi kenaikan sebesar 6,62 persen per tahun selama kurun waktu 2009-2013. Aset yang tersebar nilainya adalah aset tetap yang mencapai nilai Rp. 4.377.998.569.847,94 Kemudian aset lainnya yang mencapai nilai Rp. 125.327.463.513,50 atau terjadi pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu 2009- 2013 sebesar 272,26 persen. Selanjutnya aset lancar yang mencapai nilai Rp. 201.665.671.563,90 atau terjadi pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu

2009- 2013 sebesar 13,94 persen. Investasi jangka panjang mencapai Rp. 65.441.893.284,70 atau terjadi pertumbuhan rata-rata selama 2009-2013 sebesar 14,95 persen. Sementara dana cadangan dari tahun 2009 sampai pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.135.768,00.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas dan dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) tahun periode akuntansi. Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2013 memiliki aset lancar yang mencapai nilai Rp. 201.665.671.563,90 yang terdiri dari (I) Kas senilai Rp. 161.939.471.446,00 yang posisinya berada di Kas Daerah senilai Rp. 161.817.407.979,00 Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp. 45.538.767,00 Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp. 76.524.700,00. (II) Piutang senilai Rp. 24.063.790.568,90 berupa Piutang Pajak senilai Rp. 245.239.990,00 Piutang Retribusi senilai Rp. 11.788.963.541,00 Piutang Dana bagi Hasil senilai Rp. 10.379.647.508,00 Bagian lancar tagihan penjualan angsuran senilai Rp. 60.527.000,00 Bagian lancar tuntutan perbendaharaan senilai Rp. 20.818.152,00 Bagian lancar piutang TGR senilai Rp. 536.494.116,90 Dan Piutang lainnya senilai Rp. 1.032.100.261,00. (III) Persediaan senilai Rp. 15.662.409.549,00 berupa Persediaan habis pakai senilai Rp. 1.345.621.983,00 Persediaan tak habis pakai senilai Rp. 31.916.109,00 dan Persediaan untuk dijual/diserahkan senilai Rp. 14.284.871.457,00.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomii atau sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2013, memiliki investasi jangka panjang mencapai nilai Rp. 65.441.893.284,70 Yang terdiri dari (I) Investasi non permanen sebesar Rp. 0,00 dan (II) Investasi permanen sebesar Rp. 65.441.893.284,70.

c. Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2013 memiliki aset tetap yang mencapai nilai Rp. 4.377.998.569.847,94 Yang terdiri dari

(i) Tanah senilai	Rp.	321.464.755.650,00
(ii) Gedung dan Bangunan	Rp.	1.218.912.526.181,00
(iii) Jalan, irigasi dan jaringan senilai	Rp.	2.314.065.022.256,00
(iv) Peralatan dan mesin senilai	Rp.	437.264.364.483,94
(v) Aset tetap lainnya senilai	Rp.	86.291.901.277,00

d. Dana cadangan

Dana cadangan dimaksudkan untuk menyediakan anggaran yang memerlukan waktu penyediaan anggaran dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran. Dana cadangan Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 1.135.768,00.

e. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak berwujud atau aset yang dalam kondisi tidak bisa dipergunakan (rusak). Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2013 memiliki aset lainnya mencapai nilai Rp. 125.327.463.513,50 Yang terdiri dari Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Perbendaharaan sebesar Rp. 1.486.407,00 Bagian Jangka Panjang Piutang TGR sebesar Rp. 1.267.469.233,00 Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa sebesar Rp. 78.800.000,00 Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp. 99.680.000,00 Piutang BPR/BKPD/LPK BBU sebesar Rp. 7.481.542.445,00 Piutang Dakabalarea sebesar Rp. 2.144.730.739,00 Dan Aset lain-lain senilai Rp. 114.253.754.689,50.

### 3.2.3.2. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul sebagai akibat dari pemenuhan terhadap kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas atau tanggung jawab dimasa lalu yang mengalami defisit. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 66.804.523.540,00 yang terdiri dari Kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 66.804.523.540,00.

### 3.2.3.3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2013 memiliki Ekuitas Dana adalah sebesar Rp. 4.703.630.210.438,04 yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2013, Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 134.861.148.023,90 dengan perincian sebagai berikut :
  - (i) Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran Rp. 161.817.407.979,00 (SiLPA/SiKPA)
  - (ii) Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp. 80.086.524,00
  - (iii) Cadangan Piutang Rp. 24.063.790.568,90
  - (iv) Cadangan Persediaan Rp. 15.662.409.549,00
  - (v) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran utang jk. Pendek Rp. (66.762.546.597,00)
- b. Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Kabupaten Ciamis per 31

Desember 2013, ekuitas dana investasi berjumlah sebesar Rp. 4.568.767.926.646,14 yang terdiri dari :

(i) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp. 65.441.893.284,70

(ii) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp. 4.377.998.569.847,94

(iii) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp. 125.327.463.513,50

c. Ekuitas Dana Cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Kabupaten Ciamis Per 31 Desember 2013, dana cadangan berjumlah sebesar Rp. 1.135.768,00

#### 3.2.3.4. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas adalah rasio lancar (Current Ratio) dan rasio Quick (Quick Ratio). Rasio Likuiditas Kabupaten Ciamis pada tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio lancar Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh utang atau kewajiban jangka pendeknya. Namun perlu diperhatikan juga, nilai rasio pemerintah Kabupaten Ciamis yang tiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya.

Nilai ratio quick neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2011 sebesar 153,74 dan pada tahun 2012 264,9. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Kabupaten Ciamis setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Untuk lebih jelasnya rasio likuiditas Pemerintah Kabupaten Ciamis periode tahun 2009 sampai 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1. berikut ini

**Tabel 3.21**  
**Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2009-2013**

No	Uraian	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	1.295,91	386,17	185,08	287,22	301,87
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	1.220,56	343,15	153,74	264,90	278,43
3	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,37	0,77	1,18	1,40	1,40
4	Rasio Total Hutang Terhadap Modal	0,37	0,78	1,19	1,42	1,42
5	Rata-rata Umur Piutang		1,73	2,57	3,31	3,56
6	Rata-rata Umur Persediaan		3,02	3,09	2,94	2,43

### 3.2.3.5. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas.

Rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Ciamis selama periode 2009-2013 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Ciamis cukup kuat untuk membayar manakala melakukan pinjaman ke kreditor. Untuk lebih jelasnya rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2009-2013 sebagai tercantum dalam tabel 3.22 berikut ini :

**Tabel 3.22**  
**Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2009-2013**

No	Uraian	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
1	Rasio Kewajiban Terhadap Aset	0,37	0,77	1,18	1,40	1,40
2	Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	0,37	0,78	1,19	1,42	1,42

### 3.2.4 Analisis Kerangka Pendanaan

**Tabel 3.23**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013**

No	Uraian	Anggaran				
		2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	2011 (Rp.)	2012 (Rp.)	2013 (Rp.)
1	Pendapatan	1.410.081.200.615,00	1.307.941.678.501,00	1.641.226.705.135,00	1.876.326.521.303,00	2.212.061.140.549,00
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	25.386.679.216,00	163.161.596.832,00	92.679.416.701,00	60.261.399.594,00	144.175.496.317,00
	Total Penerimaan	1.435.467.879.831,00	1.471.103.275.333,00	1.733.906.121.836,00	1.936.587.920.897,00	2.366.236.636.866,00
	Dikurangi :					
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	820.260.981.985,00	805.191.706.586,00	872.744.709.870,00	1.025.683.817.044,00	1.066.870.901.006,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	615.206.897.846,00	665.911.568.747,00	861.161.411.966,00	910.904.103.853,00	1.299.365.735.860,00

**Tabel 3.24**  
**Anggaran Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013**

No	Uraian	Anggaran				
		2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)
<b>I.</b>	<b>Kapasitas Keuangan Daerah</b>	<b>1.435.467.879.831,00</b>	<b>1.471.103.275.333,00</b>	<b>1.733.906.121.836,00</b>	<b>1.936.587.920.897,00</b>	<b>2.366.236.636.866,00</b>
	Prioritas I (Wajib dan Mengikat)	<b>820.260.981.985,00</b>	<b>805.191.706.586,00</b>	<b>872.744.709.870,00</b>	<b>1.025.683.817.044,00</b>	<b>1.066.870.901.006,00</b>
a.	Belanja Tidak Langsung	759.289.810.103,00	739.413.603.174,00	807.285.000.662,00	923.027.495.576,00	968.301.912.229,00
b.	Belanja Langsung	55.179.171.882,00	55.737.450.212,00	56.900.824.008,00	76.413.954.468,00	92.068.988.777,00
c.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.792.000.000,00	10.040.653.200,00	8.558.885.200,00	26.242.367.000,00	6.500.000.000,00
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>615.206.897.846,00</b>	<b>665.911.568.747,00</b>	<b>861.161.411.966,00</b>	<b>910.904.103.853,00</b>	<b>1.299.365.735.860,00</b>
<b>II</b>	<b>Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II</b>	<b>200.253.988.456,00</b>	<b>277.711.403.124,00</b>	<b>482.553.631.710,00</b>	<b>486.052.046.751,00</b>	<b>649.375.336.846,00</b>
a.	Belanja Program Prioritas dalam rangka Pencapaian Visi Misi KDH					
b.	Belanja Program Prioritas Pembangunan Daerah					
c.	Belanja Program Prioritas Pendukung Lainnya					
<b>III.</b>	<b>Rencana alokasi pengeluaran prioritas III</b>	<b>414.952.909.390,00</b>	<b>388.200.165.623,00</b>	<b>378.607.780.256,00</b>	<b>424.852.057.102,00</b>	<b>649.990.399.014,00</b>
a.	Tambahan Penghasilan Pegawai	27.381.722.540,00	102.622.044.809,00	224.255.650.256,00	283.389.688.672,00	417.852.741.548,00
b.	Uang Lembur	1.411.141.500,00	874.360.500,00	628.185.500,00	620.313.500,00	1.241.933.000,00
c.	Bantuan Hibah	188.679.812.350,00	107.842.497.314,00	73.371.613.500,00	37.523.500.000,00	109.091.334.000,00
d.	Bantuan Sosial	113.726.688.000,00	113.194.988.000,00	13.606.368.000,00	5.408.900.000,00	12.196.178.061,00
e.	Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	83.753.545.000,00	63.666.275.000,00	66.745.963.000,00	97.909.654.930,00	109.608.212.405,00
<b>IV.</b>	<b>Surplus Anggaran Riil/Berimbang</b>	-	-	-	-	-



**Tabel 3.25**  
**Kerangka Pendanaan**  
**Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2009-2013**

No	Uraian	Alokasi									
		Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Prioritas I	820.260.981.985,00	57,14	805.191.706.586,00	54,73	872.744.709.870,00	50,33	1.025.683.817.044,00	52,96	1.066.870.901.006,00	45,09
2	Prioritas II	200.253.988.456,00	13,95	277.711.403.124,00	18,88	482.553.631.710,00	27,83	486.052.046.751,00	25,10	649.375.336.846,00	27,44
3	Prioritas III	414.952.909.390,00	28,91	388.200.165.623,00	26,39	378.607.780.256,00	21,84	424.852.057.102,00	21,94	649.990.399.014,00	27,47
<b>Total</b>		<b>1.435.467.879.831,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.471.103.275.333,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.733.906.121.836,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.936.587.920.897,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.366.236.636.866,00</b>	<b>100,00</b>

### 3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Ciamis dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ciamis yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang.

Pendanaan rencana kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2014-2018 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari gambaran umumpengelolaan keuangan daerah pada periode 2009–2013 maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2014-2018.

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber dana, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

### 3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

**Tabel 3.26**  
**Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan**  
**Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Data Th. 2013 (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2015 (Rp.)	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)	2019 (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.182.782.635.190,00</b>		<b>979.056.847.417,00</b>	<b>1.046.085.592.371,00</b>	<b>1.101.304.799.800,00</b>	<b>1.146.460.965.073,00</b>	<b>1.209.025.297.359,00</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	932.148.322.124,00	7,09	821.112.671.842	870.872.099.756	899.436.704.628	934.154.961.427	969.279.187.976
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/Wakil KDH	4.179.999.600,00	11,66	4.444.175.575	4.713.492.615	4.868.095.172	5.056.003.646	5.246.109.383
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	109.091.334.000,00	24,68	50.000.000.000,00	60.000.000.000,00	70.000.000.000,00	75.000.000.000,00	110.000.000.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial	12.196.178.061,00	15,97	8.500.000.000,00	9.000.000.000,00	9.500.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
7	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.908.589.000,00	2,68	10.000.000.000,00	11.500.000.000,00	12.500.000.000,00	13.500.000.000,00	14.500.000.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pripinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	109.608.212.405,00	8,60	70.000.000.000,00	75.000.000.000,00	85.000.000.000,00	88.750.000.000,00	85.000.000.000,00
9	Belanja Tidak Terduga	9.650.000.000,00	156,69	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00

<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>40.962.060.467,00</b>		<b>47.359.859.769,00</b>	<b>48.676.444.642,00</b>	<b>50.045.109.778,00</b>	<b>51.468.409.789,00</b>	<b>52.946.584.373,00</b>
1	Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis	26.045.150.699,00	41,34	33.212.337.802,00	33.743.735.207,00	34.283.634.970,00	34.832.173.129,00	35.389.487.899,00
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	32.217.680,00	10,97	52.775.000,00	55.704.013,00	58.795.585,00	62.058.740,00	63.051.680,00
3	Belanja Jasa Kantor (Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	10.326.152.538,00	14,62	9.453.132.941	9.977.781.819	10.531.548.710	11.116.049.663	11.732.990.419
4	Belanja Sewa Gedung Kantor	3.664.093.050,00	30,65	3.475.815.331	3.668.723.081	3.872.337.212	4.087.251.928	4.314.094.410
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	894.446.500,00	13,87	1.165.798.695	1.230.500.522	1.298.793.301	1.370.876.329	1.446.959.965
<b>C</b>	<b>Pembiayaan Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>		<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (A+B+C)</b>		<b>1.223.744.695.657,00</b>		<b>1.036.416.707.186,00</b>	<b>1.104.762.037.013,00</b>	<b>1.161.349.909.578,00</b>	<b>1.207.929.374.862,00</b>	<b>1.261.971.881.732,00</b>

### 3.3.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan 2014-2019 Berdasarkan Data Masa Lalu

#### a. Arah kebijakan 2014-2019

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Disamping itu, dengan keterbatasan anggaran yang setiap tahun senantiasa mengemuka, diharapkan timbul kreatifitas dan inovasi dalam pencairan sumber-sumber pendanaan bagi percepatan pembangunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD, target pencapaian IPM, dukungan terhadap MDG's, program prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan Fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang profesional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dirincikan sinergi pembangunan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terutama merespon 14 (empat belas) prioritas pembangunan nasional, 10 (sepuluh) common goals Provinsi Jawa Barat, 10 program pembangunan daerah Kabupaten Ciamis serta pengarusutamaan gender yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan anggaran berbasis kinerja, dengan berdasarkan kepada agenda-agenda pembangunan yang secara umum dapat dicirikan melalui :

a. Pencapaian rencana pembangunan yang tercantum RPJMD 2014-2019.

- b. Mendanai kegiatan program prioritas, regular, dasar dan kecamatan.
- c. Pencapaian IPM merujuk kepada RPJP 2005-2015 dan ketentuan PP No. 6 Tahun 2008.
- d. Mendukung percepatan pembangunan nasional (INPRES NOMOR 1/2010) dan program pembangunan yang berkeadilan (INPRES No. 3/2010).
- e. Mendanai kegiatan yang bersifat lanjutan (Komitmen Program).
- f. Mendanai kegiatan bersifat terobosan (Program baru/Terobosan).
- g. Mendanai kegiatan yang mampu mengungkit performance Ciamis secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Ciamis.
- h. Mendanai Program Janji Bupati dan Wakil Bupati.

### 3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

#### a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

##### 1) Kebijakan

Kebijakan Keuangan Daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Ciamis sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Adapun komposisi penerimaan pendapatan daerah dalam perencanaan jangka menengah daerah, yaitu :

1. 8,00 % berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. 80,26 % berasal dari Dana Perimbangan,
3. 11,74 % berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

##### 2) Strategi

###### a) Strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah :

1. Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai peraturan Perundang-undangan dan potensi daerah;

2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah;
  3. Penegakkan aturan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  4. Reformasi Birokrasi pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b) Strategi untuk meningkatkan Dana Perimbangan adalah :
1. Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak penghasil orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21 ;
  2. Peningkatan akurasi data sumberdaya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
  3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam peningkatan Dana Perimbangan;
  4. Peningkatan organisasi dengan SKPD terkait di Kabupaten.
- c) Strategi untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah :
1. Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Provinsi;
  2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
  3. Menjalin kerjasama dan jejaring dengan lembaga Non Pemerintah.

3) Upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan dan Strategi pendapatan daerah adalah:

- a) Pendapatan Asli Daerah:
1. Penyusunan dan penyempurnaan dasar hukum pengelolaan pendapatan daerah (PAD) ;
  2. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan Pendapatan Asli daerah (PAD);
  3. Sosialisasi kebijakan dan aturan pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

4. Peningkatan layanan secara khusus untuk kemudahan masyarakat dalam membayar pajak;
5. Pemberian reward bagi wajib pajak berprestasi;
6. Peningkatan fungsi kontrol di dalam maupun antar SKPD/unit kerja dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
7. Peningkatan upaya penertiban atas pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh masyarakat;
8. Optimalisasi denda atas keterlambatan pembayaran pajak dan/atau retribusi;
9. Penataan kelembagaan SKPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);
10. Peningkatan Kompetensi Personil SKPD Pengelola PAD melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis Pengelolaan PAD;
11. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan ISO 9001-2000;
12. Penyusunan data base Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
13. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
14. Peningkatan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
15. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;

b) Dana Perimbangan :

1. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertical sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak pusat;



2. Penyusunan regulasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan:
  3. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumberdaya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan;
  4. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumberdaya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
  5. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis untuk mengupayakan peningkatan besaran DAU.
- c) Lain-lain Pendapatan yang sah :
1. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Provinsi sebagai upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak provinsi;
  2. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Teknis dan Lembaga Non Pemerintah;
  3. Koordinasi dengan pemerintah provinsi Jawa barat dan OPD teknis terkait.

Dengan mempertimbangkan kecenderungan pencapaian pendapatan daerah, kondisi ekonomi makro secara nasional dan regional, serta kapasitas OPD penghasil, maka diperkirakan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Ciamis rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan sekitar 5,10 % sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.27 berikut ini.

**Tabel 3.27**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019**

Uraian Pendapatan	Target Murni				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Daerah	1.732.679.102.000,00	1.851.708.346.000,00	1.956.730.270.000,00	2.035.725.881.000,00	2.113.211.924.000,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	146.364.806.000,00	150.458.346.000,00	155.030.270.000,00	159.575.881.000,00	162.361.924.000,00
1 Pajak Daerah	26.133.167.000,00	27.917.168.000,00	28.525.000.000,00	29.853.000.000,00	30.111.100.000,00
2 Retribusi Daerah	11.881.639.000,00	12.241.178.000,00	13.305.270.000,00	14.522.881.000,00	15.250.824.000,00
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.500.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.500.000.000,00
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	105.850.000.000,00	107.600.000.000,00	110.500.000.000,00	112.500.000.000,00	114.500.000.000,00
Dana Perimbangan	1.378.089.296.000,00	1.486.000.000.000,00	1.573.700.000.000,00	1.641.150.000.000,00	1.700.350.000.000,00
1 Dana Bagi Hasil Pajak/hasil Bukan Pajak	59.500.000.000,00	60.500.000.000,00	62.500.000.000,00	65.500.000.000,00	70.100.000.000,00
2 Dana Alokasi Umum	1.168.289.296.000,00	1.260.500.000.000,00	1.335.950.000.000,00	1.395.150.000.000,00	1.445.250.000.000,00
3 Dana Alokasi Khusus	150.300.000.000,00	165.000.000.000,00	175.250.000.000,00	180.500.000.000,00	185.000.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	208.225.000.000,00	215.250.000.000,00	228.000.000.000,00	235.000.000.000,00	250.500.000.000,00
1 Hibah					
2 Dana Darurat					
3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	52.500.000.000,00	55.000.000.000,00	57.500.000.000,00	59.500.000.000,00	65.000.000.000,00
4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	155.725.000.000,00	160.250.000.000,00	170.500.000.000,00	175.500.000.000,00	185.500.000.000,00

Asumsi dasar yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 (lima) tahun sebagaimana tabel tersebut di atas adalah :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun antara lain dilatarbelakangi oleh :

- a) Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009;
- b) Perubahan Kelas Tanah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada objek PBB serta perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) pada objek BHPHTB;
- c) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya;

- d) Adanya sinergitas di dalam maupun antar OPD Pengelola Pendapatan;
- e) Terlaksananya penataan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM personil, pemenuhan sarana dan prasarana serta system operasional pemungutan pendapatan daerah;
- f) Peningkatan pelayanan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh OPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- g) Peningkatan pemanfaatan asset dan keuangan daerah;
- h) Penggalian potensi pendapatan dari BUMD.

## 2) Dana Perimbangan

- a) Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.
- b) Meningkatnya akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan.

## 3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama lima tahun kedepan dilatarbelakangi oleh :

- a) Adanya penambahan dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yaitu pajak rokok yang mulai dibagikan ke daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2014.
- b) Adanya penambahan jumlah guru yang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru PNSD.
- c) Adanya penambahan jumlah penerimaan guru baru dari penerimaan CPNSD Kategori 2 pada Tahun 2013.

## b. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit dan surplus anggaran. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran atau belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran atau belanja. Untuk

menutupi anggaran yang mengalami defisit maupun surplus anggaran diperlukan pembiayaan daerah.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal terjadi defisit anggaran, sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah dan pembayaran kewajiban pada pihak ketiga.

Kebijakan pembiayaan daerah mencakup dua sumber yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dengan arah kebijakan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Sisa Lebih Penganggaran Tahun Lalu (SILPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun berikutnya dan rata-rata SILPA diupayakan seminimal mungkin dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni maksimal dibawah 6 (enam) prosen dari kebutuhan belanja dengan melaksanakan perencanaan dan penganggaran secara konsisten.
- 2) Penyertaan modal BUMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil kajian dan tindak lanjut revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.
- 3) Pemenuhan Kebutuhan Dana Cadangan yang dipergunakan untuk mempersiapkan pembiayaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2019-2024 dan diproyeksikan dilakukan pada tahun 2019 sebelum masa berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2014-2019.
- 4) Penerimaan Piutang Daerah

5) Perintisan pelaksanaan pinjaman daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis.

6) Investasi Non Permanen dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

c. Proyeksi Pembiayaan Daerah 2015-2019

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.28 sebagai berikut :

**Tabel 3.28**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019**

Uraian Pembiayaan	Target Murni				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Pembiayaan Daerah</b>					
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>40.500.000.000,00</b>
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2 Pencairan Dana Cadangan					40.000.000.000,00
3 Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan					
4 Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah					
5 Penerimaan Piutang Daerah					
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>17.500.000.000,00</b>	<b>18.500.000.000,00</b>	<b>19.500.000.000,00</b>	<b>20.500.000.000,00</b>	<b>11.500.000.000,00</b>
1 Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	8.500.000.000,00	9.500.000.000,00	10.500.000.000,00	11.500.000.000,00
3 Pembayaran Pokok Utang					
4 Pemberian Pinjaman Daerah					
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(17.000.000.000,00)</b>	<b>(18.000.000.000,00)</b>	<b>(19.000.000.000,00)</b>	<b>(20.000.000.000,00)</b>	<b>29.000.000.000,00</b>

Proyeksi Pembiayaan Daerah sebagaimana tersebut di atas menunjukkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2019-2024
- 2) Kewajiban penyediaan penyertaan modal bagi BUMD

- 3) Defisit anggaran sebagai akibat kebutuhan belanja yang lebih besar dari potensi pendapatan, diupayakan dari pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

**Tabel 3.29**  
**Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	Saldo Neraca Daerah							
	Dikurangi :							
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan							
3	Kegiatan Lanjutan							
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran							

d. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Ciamis tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.30 berikut ini :

**Tabel 3.30**  
**Proyeksi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019**

Uraian	Target Murni				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.715.679.102.000,00</b>	<b>1.833.708.346.000,00</b>	<b>1.937.730.270.000,00</b>	<b>2.015.725.881.000,00</b>	<b>2.142.211.924.000,00</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.097.053.749.000,00</b>	<b>1.171.250.000.000,00</b>	<b>1.230.571.340.000,00</b>	<b>1.280.684.820.000,00</b>	<b>1.348.255.650.000,00</b>
1 Belanja Pegawai	943.553.749.000,00	1.000.750.000.000,00	1.033.571.340.000,00	1.073.434.820.000,00	1.113.755.650.000,00
2 Belanja Bunga					
3 Belanja Subsidi					
4 Belanja Hibah	50.000.000.000,00	60.000.000.000,00	70.000.000.000,00	75.000.000.000,00	110.000.000.000,00
5 Belanja Bantuan Sosial	8.500.000.000,00	9.000.000.000,00	9.500.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6 Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10.000.000.000,00	11.500.000.000,00	12.500.000.000,00	13.500.000.000,00	14.500.000.000,00
7 Belanja Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Desa Lainnya	70.000.000.000,00	75.000.000.000,00	85.000.000.000,00	88.750.000.000,00	85.000.000.000,00
8 Belanja Tak Terduga	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00
<b>Belanja Langsung</b>	<b>618.625.353.000,00</b>	<b>662.458.346.000,00</b>	<b>707.158.930.000,00</b>	<b>735.041.061.000,00</b>	<b>793.956.274.000,00</b>

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Ciamis periode tahun 2015-2019 pada tabel di atas dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan Belanja Pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji dan tunjangan serta penambahan jumlah pegawai.
- 2) Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi misi Kabupaten Ciamis 2015-2019.
- 3) Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.
- 4) Belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja. Pengeluaran belanja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran, memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 5) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya sehingga pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Terselenggaranya pemerintahan amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis harus ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang cukup.
- 7) Bidang infrastruktur memiliki porsi yang paling besar dalam rencana anggaran belanja terutama pada awal-awal tahun perencanaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis.
- 8) Pada bidang pendidikan dan kesehatan, direncanakan anggaran bidang pendidikan sudah sesuai dengan amanat Undang-undang yaitu

sebesar 20 % dari total anggaran, dan pada bidang kesehatan minimal sebesar 10 % dari total anggaran belanja.

- 9) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan harus dilaksanakan tanpa merusak kelestarian lingkungan hidup. Pengalihan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku.

Tabel 3.31  
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019

No	Uraian	Proyeksi				
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	Pendapatan	1.732.679.102.000,00	1.851.708.346.000,00	1.956.730.270.000,00	2.035.725.881.000,00	2.113.211.924.000,00
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000.000,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	<b>Tota Penerimaan</b>	<b>1.733.179.102.000,00</b>	<b>1.852.208.346.000,00</b>	<b>1.957.230.270.000,00</b>	<b>2.036.225.881.000,00</b>	<b>2.153.711.924.000,00</b>
	Dikurangi :					
4	Belanja Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	861.581.865.834,00	913.095.084.828,00	947.513.252.540,00	983.646.397.598,00	1.005.756.473.332,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	<b>871.597.236.166,00</b>	<b>939.113.261.172,00</b>	<b>1.009.717.017.460,00</b>	<b>1.052.579.483.402,00</b>	<b>1.147.955.450.668,00</b>



**Tabel 3.32**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Proyeksi				
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
<b>I.</b>	<b>Kapasitas Keuangan Daerah</b>	<b>1.733.179.102.000,00</b>	<b>1.852.208.346.000,00</b>	<b>1.957.230.270.000,00</b>	<b>2.036.225.881.000,00</b>	<b>2.153.711.924.000,00</b>
	<b>Prioritas I (Wajib dan Mengikat)</b>	<b>861.581.865.834,00</b>	<b>913.095.084.828,00</b>	<b>947.513.252.540,00</b>	<b>983.646.397.598,00</b>	<b>1.005.756.473.332,00</b>
a.	Belanja Tidak Langsung	771.084.074.180,00	816.425.000.000,00	844.568.498.800,00	876.411.552.400,00	900.569.633.000,00
b.	Belanja Langsung	72.997.791.654,00	78.170.084.828,00	83.444.753.740,00	86.734.845.198,00	93.686.840.332,00
c.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.500.000.000,00	18.500.000.000,00	19.500.000.000,00	20.500.000.000,00	11.500.000.000,00
	<b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b>	<b>871.597.236.166,00</b>	<b>939.113.261.172,00</b>	<b>1.009.717.017.460,00</b>	<b>1.052.579.483.402,00</b>	<b>1.147.955.450.668,00</b>
<b>II</b>	<b>Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II</b>	<b>544.637.760.781,20</b>	<b>583.228.327.818,40</b>	<b>622.582.721.972,00</b>	<b>647.130.150.104,40</b>	<b>698.999.103.629,60</b>
a.	Belanja Program Prioritas dalam rangka Pencapaian Visi Misi KDH					
b.	Belanja Program Prioritas Pembangunan Daerah					
c.	Belanja Program Prioritas Pendukung Lainnya					
<b>III.</b>	<b>Rencana alokasi pengeluaran prioritas III</b>	<b>326.959.475.384,80</b>	<b>355.884.933.353,60</b>	<b>387.134.295.488,00</b>	<b>405.449.333.297,60</b>	<b>448.956.347.038,40</b>
a.	Tambahan Penghasilan Pegawai	197.469.674.820,00	210.825.000.000,00	221.502.841.200,00	230.523.267.600,00	242.686.017.000,00
b.	Uang Lembur	989.800.564,80	1.059.933.353,60	1.131.454.288,00	1.176.065.697,60	1.270.330.038,40
c.	Bantuan Hibah	50.000.000.000,00	60.000.000.000,00	70.000.000.000,00	75.000.000.000,00	110.000.000.000,00
d.	Bantuan Sosial	8.500.000.000,00	9.000.000.000,00	9.500.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
e.	Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	70.000.000.000,00	75.000.000.000,00	85.000.000.000,00	88.750.000.000,00	85.000.000.000,00
<b>IV.</b>	<b>Surplus Anggaran Riil/Berimbang</b>	-	-	-	-	-

**Tabel 3.33**  
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Alokasi									
		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Prioritas I	861.581.865.834,00	49,71	913.095.084.828,00	49,30	947.513.252.540,00	48,41	983.646.397.598,00	48,31	1.005.756.473.332,00	46,70
2	Prioritas II	544.637.760.781,20	31,42	583.228.327.818,40	31,49	622.582.721.972,00	31,81	647.130.150.104,40	31,78	698.999.103.629,60	32,46
3	Prioritas III	326.959.475.384,80	18,86	355.884.933.353,60	19,21	387.134.295.488,00	19,78	405.449.333.297,60	19,91	448.956.347.038,40	20,85
<b>Total</b>		<b>1.733.179.102.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.852.208.346.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.957.230.270.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.036.225.881.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.153.711.924.000,00</b>	<b>100,00</b>